

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
(Studi tentang Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan)**

T E S I S

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**NUR ROHMAT
D4E001021**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2002**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

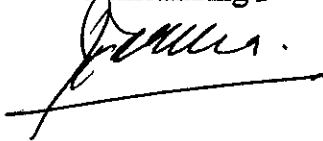
NAMA : NUR ROHMAT

NIM : D4E001021

Tesis telah disetujui Tim Pembimbing:

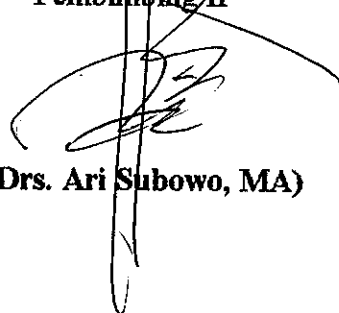
Tanggal 19 September 2002

Pembimbing I



(Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD)

Pembimbing II



(Drs. Ari Subowo, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
(PPK) DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh


NUR ROHMAT


D4E001021


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

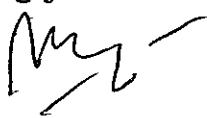
Pada tanggal: 22 September 2002

Susunan Tim Penguji


Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD
Pembimbing I



Drs. Edi Santoso, SU
Penguji I


Drs. Ari Subowo, MA
Pembimbing II


Dra. M. Suryaningsih, MS
Penguji II

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister


Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD
Ketua Program Studi M A P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lain dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu
berharap (Qs. Al Insyirah : 6-7)

Kepandaian hanyalah alat untuk mencapai kristal-
kristal keberhasilan, dan perlu diingat bahwa semua
itu hanyalah titipan Allah, maka janganlah kamu
membanggakan kepandaian itu sehingga lupa pada
yang memberi.

Persembahan:

- >Kepada Bapak dan Ibu tercinta*
- >Kepada Kakak-kakakku dan Adik-
Adikku tersayang*
- >Angsa putihku yang memberi
motivasi dalam pembuatan Tesis*
- >Almamaterku*

PERNYATAAN

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua, yang bertanda tangan di bawah ini, nama: Nur Rohmat, NIM: D4E001021, menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat Pernyataan

Nur Rohmat

ABSTRAKSI

Dewasa ini masalah yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multi dimensi yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut melalui program-program pembangunan masyarakat miskin, antara lain Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang ditindak lanjuti dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial-ekonomi pedesaan dengan sasaran pokok yaitu (1) meningkatnya partisipasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, (2) Meningkatnya kegiatan usaha, lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan, (3) tersedianya prasarana dan sarana bagi pengembangan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, (4) meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa dan di tingkat kecamatan untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

Penelitian ini memfokuskan pada aspek Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan terhadap Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Penelitian ini adalah jenis *explanatory* yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat berbagai variabel yang diteliti. Uji hipotesa menggunakan Korelasi Rank-Kendall's dan Konkordansi Rank-Kendall's, dengan hasil sebagai berikut : (1) Ada hubungan yang signifikan antara Komunikasi dengan Implementasi PPK dengan signifikansi sebesar 95%, dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,329, (2) ada hubungan yang signifikan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi PPK dengan tingkat signifikansi sebesar 95%. Sementara koefisiensi korelasinya sebesar 0,392, (3) ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan Implementasi PPK dengan tingkat signifikansi sebesar 95%, dan koefisiensi korelasi sebesar 0,397, (4) Secara bersama-sama ada hubungan yang signifikan antara Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan terhadap Implementasi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,666.

ABSTRACT

A problem that is still be a challenge for Indonesia nowadays is poverty. Poverty is a multi-dimensional problem in development that relates to the social, economy, cultural aspects and others. Therefore, the government attempt to reduce the number of poor people through developmental program, such as Inpres Desa Tertinggal (IDT), followed up with Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Pengembangan Kecamatan aims to speed up the solving of the poverty nationally by giving fund for improving the productive business activities and building the means and infrastructure that support the social-economy activities of rural society. Its main purpose are : (1) the increase of social participation in planning, implementing, and continuing the social-economy activities of rural society, (2) the increase of business activity, opportunities of employment, and living-source for rural society, (3) the availability of means and infrastructure for developing the social-economy activity of the society, (4) the increase of the institution's and officials' ability in the rural area and district level to coordinate and empower the society in implementing the developmental program.

This research focuses on communication, institutional ability, and control aspects toward the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK) in Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

The research design is explanatory which's have purposes on examining the hypothesis of the causal correlation among communication, institutional ability, and control variables toward the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Statistical methods uses Rank-Kendall's Correlation and Rank-Kendall's Concordance. The survey results found that: (1) there is a significant correlation between communication and the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK) with coefficient correlation is 0,329 by significance level is 95%. (2) there is a significant correlation between institutional ability and the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK). While the significance level is 95%, the coefficient correlation is 0,392, (3) there is a significant correlation between control and the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK) with significance level is 95% and the coefficient correlation is 0,397, (4) Simultaneously, communication, institutional ability and control create a significant correlation toward the implementation of Program Pengembangan Kecamatan (PPK) in Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Its coefficient correlation is 0,666.

RINGKASAN

Penelitian ini berawal dari temuan Konsultan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Propinsi Jawa Tengah di Bappeda Propinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2002, yang menyebutkan bahwa implementasi PPK di Kabupaten Demak pada Tahun Pertama (98/99) dan Tahun Kedua (1999/2000) kurang berhasil. Kondisi ini tercermin dari *pertama* besarnya tunggakan angsuran untuk kegiatan simpan pinjam, dari total pinjaman Rp. 3.433.795.600,- telah terjadi tunggakan angsuran sebesar Rp. 665.908.574,-. Khusus Kecamatan Wedung besarnya tunggakan angsuran simpan pinjam dari total pinjaman Rp. 515.782.400,- telah terjadi tunggakan angsuran sejumlah Rp. 172.449.250,-. *Kedua* prasarana fisik yang telah dibangun misalnya Bendung Gerak di desa Tedunan dan saluran air di desa Mutih Wetan tidak bermanfaat, karena kondisi bangunannya tidak sempurna. *Ketiga*, Tidak tersedianya dana untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang rusak, sehingga menyebabkan kerusakan bangunan semakin membesar. *Keempat*, kurangnya media komunikasi seperti papan informasi di desa-desa dan *kelima* adalah penanganan penyelesaian masalah PPK yang sering terlambat. Mengacu pada temuan selama pra survei, paling tidak terdapat 3 faktor yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Wedung adalah *pertama* komunikasi kurang berjalan baik. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa masalah yang ada di desa adalah aib desa sehingga tidak perlu disebarluaskan ke desa lain. *Kedua* kemampuan organisasi masih rendah, hal ini disebabkan karena insentif pengelola PPK yang sangat kecil, tidak tersedianya fasilitas misalnya mesin ketik, komputer sehingga menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan. *Ketiga* pengawasan yang masih lemah, hal ini disebabkan karena pengawasan preventif masih kurang dan sanksi pelanggaran tidak ditegakkan.

Sesuai dengan permasalahan di atas kemudian diadakan analisis untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan antara Komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan dengan implementasi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Hasil pengujian hipotesis melalui analisis konkordansi Kendall's terhadap ketiga variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,666 dengan nilai Chi-Square terdapat koefisien sebesar 26,595 dan apabila dikonsultasikan dengan harga tabel dengan tingkat kebenaran 95% maka nilai Chi-Square tabel adalah 7,82, sehingga harga Chi-Square hitung lebih besar jika dibandingkan dengan harga Chi-Square tabel ($26,595 > 7,82$). Ini artinya bahwa ada hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan dengan implementasi PPK di Kecamatan Wedung kabupaten Demak. Sedangkan besar pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap Implementasi PPK adalah 0,44 atau mempunyai pengaruh sebesar 44% dan sisanya adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai dengan baik, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”.

Meskipun dalam penyusunan Tesis ini penulis telah memanfaatkan segala daya, upaya serta kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak pihak yang telah membantu, baik secara material maupun spiritual, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Ari Subowo, MA, sebagai Pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah serta seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
5. Camat Wedung Kabupaten Demak.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Demak.
7. Konsultan PFK Propinsi Jawa Tengah.

8. Konsultan PPK Kabupaten Demak.
9. Rini Susanti Wulandari, angsa putihku.
10. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten dan masyarakat pada umumnya

Semarang, September 2002

Penulis

NUR ROHMAT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)	3
2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	8
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengkajian Teoritis	21
1. Kebijakan Publik	21
2. Implementasi Kebijakan Publik	24
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	34
a. Komunikasi	35
b. Kemampuan Organisasi	46
c. Pengawasan	55
4. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi PPK	61

5 Hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi PPK ...	63
6. Hubungan Pengawasan dengan Implementasi PPK	63
7. Hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Pengawasan Dengan Implementasi PPK	65
B. Pembahasan Penelitian yang relevan	66
C. Hipotesis	69
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Rancangan Penelitian	71
B. Ruang Lingkup Penelitian	71
C. Lokasi Penelitian	71
D. Variabel Penelitian	72
1. Klasifikasi Variabel	72
2. Definisi Konseptual	72
3. Definisi Operasional	74
4. Jenis dan Sumber Data	78
5. Instrumen Penelitian	78
6. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel	79
7. Tehnik pengumpulan Data	83
8. Tehnik Pengolahan Data	84
9. Tehnik Analisa Data	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	90
A. Hasil Penelitian	90
1. Identitas Responden	90
2. Implementasi PPK	93
3. Komunikasi	104
4. Kemampuan Organisasi	115
5. Pengawasan	123
B. Pembahasan Hasil Penelitian	130
1. Kategori variabel penelitian	130

a. Kategori variabel implementasi PP	131
b. Kategori variabel komunikasi	133
c. Kategori variabel kemampuan organisasi	134
d. Kategori variabel pengawasan	136
C. Uji Hipotesis	137
a. Hubungan Variabel Komunikasi dengan Implementasi	138
b. Hubungan Variabel Kemampuan Organisasi dengan impele- mentasi	140
c. Hubungan Variabel Pengawasan dengan Implementasi	142
d. Hubungan Variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan dengan Implementasi	144
D. Diskusi	144
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	147
A. Simpulan	147
B. Saran-Saran	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nomor
1. Model Implementasi kebijakan Grindle	28
2. Model Implementasi Edward III	30
3. Model Komunikasi Lasswell	38
4. Model Komunikasi Dua Arah Seiler	39
5. Model Komunikasi Dua Arah Arni Muhammad	41
6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi PPK	60
7. Geometrik Hipotesis	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Nomor
1. Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Propinsi Jawa Tengah	10
2. Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kabupaten Dmak	11
3. Tunggakan angsuran dana PPK di Kabupaten Demak, Tahun Pertama (1998/1999) Periode Maret 2002	14
4. Tunggakan Angsuran dana PPK di Kabupaten Demak Tahun Kedua (1999/2000) Periode Maret 2002	15
5. Jumlah responden berdasarkan usia	90
6. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin	91
7. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan	91
8. Jumlah responden berdasarkan mata pencaharian	92
9. Penggunaan dana PPK sesuai rencana	93
10. Dana PPK untuk usaha produktif telah mencukupi	95
11. Dana PPK untuk membangun atau mengembangkan prasarana/ sarana desa telah mencukupi	96
12. Prasarana yang dibangun atau dikembangkan telah sesuai dengan desa	97
13. Prasarana yang dibangun atau dikembangkan sudah bermanfaat bagi masyarakat desa	97
14. Keikutsertaan masyarakat desa dalam merencanakan kebutuhan desa	99

15. Keikutsertaan masyarakat desa dalam melestarikan PPK	100
16. PPK mampu meningkatkan kegiatan ekonomi desa	101
17. PPK sebagai lapangan kerja baru	102
18. PPK mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa	103
19. PPK mampu meningkatkan kemampuan lembaga desa	103
20. Fasilitator desa sering melaksanakan sosialisasi PPK ke desa-desa	104
21. Kejelasan informasi dalam sosialisasi PPK	105
22. Sosialisasi PPK melalui selebaran	106
23. Sosialisasi PPK melalui papan pengumuman	106
24. Sosialisasi PPK melalui perkumpulan pengajian	107
25. Sosialisasi PPK melalui perkumpulan warga di balai desa atau rumah Kepala Desa	108
26. Saran dan masukan demi keberhasilan PPK	108
27. Penerimaan saran dan masukan demi keberhasilan PPK	109
28. Surat sebagai media menyampaikan saran dan masukan	110
29. Perkumpulan warga di kantor Kepala Desa atau di rumah Kepala Desa sebagai media menyampaikan saran dan masukan	111
30. Komunikasi untuk koordinasi pelaksanaan tugas PPK di desa-desa	111
31. Komunikasi untuk koordinasi dalam pemecahan masalah PPK	112
32. Komunikasi untuk koordinasi pelaksanaan tugas PPK antar desa	113
33. Komunikasi untuk koordinasi pemecahan masalah antar desa	114
34. Tercukupinya jumlah tenaga pengelola PPK di desa	115
35. Pendelegasian wewenang/perintah dari kecamatan kepada desa	116

36. Tercukupinya insentif bagi para pengelola PPK	117
37. Tersedianya fasilitas/peralatan untuk pelaksanaan PPK	118
38. Memberikan pelatihan dan keterampilan sebelum melaksanakan PPK	119
39. Pelaksanaan PPK mengikuti Prosedur yang berlaku	120
40. Melakukan antisipasi sebelum munculnya masalah	121
41. Setiap masalah diatasi dengan cepat	122
42. PPK di desa-desa dilaksanakan dengan mudah	123
43. Ketersediaan aturan dalam pelaksanaan PPK	124
44. Aturan pelaksanaan PPK mudah dipahami	124
45. Penentuan standar sesuai dengan kondisi riil masyarakat desa	125
46. Pelaksanaan kegiatan PPK sesuai dengan rencana kebutuhan desa	126
47. Hasil kegiatan PPK sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan	127
48. Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan PPK	127
49. Setiap penyimpangan PPK dilakukan tegoran	128
50. Tindak lanjut tegoran ada perubahan	129
51. Sanksi diterapkan kepada yang menyimpang	129
52. Total skor variabel implementasi PPK	131
53. Kategori Variabel implementasi PPK	132
54. Total skor variabel komunikasi	133
55. Kategori variabel komunikasi	134
56. Total skor kemampuan organisasi	134
57. Kategori variabel kemampuan organisasi	135

58. Total skor variabel pengawasan	136
59. Kategori variabel pengawasan	136
60. Hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi PPK	138
61. Uji hitung Rank kendall's	139
62. Hubungan anatara variabel kemampuan organisasi dengan implemen- tasi PPK	140
63. Uji hitung Rank Kendall's	141
64. Hubungan antara variabel pengawasan dengan variabel implemenyasi	142
65. Uji Rank Kendall's	143
66. Koefisien Konkordansi Kendall's	144

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
2. Pedoman Wawancara kepada penerima manfaat dana PPK
3. Desa Tertinggal menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1999
4. Data Keluarga Miskin di Jawa Tengah Tahun 2000
5. Hasil Quesioner penelitian, variabel Implementasi PPK
6. Hasil Quesioner penelitian, variabel Komunikasi
7. Hasil Quesioner penelitian, variabel Kemampuan Organisasi
8. Hasil Quesioner penelitian, variabel Pengawasan
9. Hasil perhitungan statistik dengan SPSS
10. Foto hasil observasi di lapangan
11. Peta Wilayah Kabupaten Demak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah publik yang sering menjadi ajang perdebatan atau pembicaraan oleh kaum intelektual maupun masyarakat biasa. Masalah kemiskinan hampir ada di setiap negara di dunia, baik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis maupun negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Kemiskinan diartikan suatu kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, melainkan juga karena struktur sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Seseorang menjadi miskin bukan karena kehendaknya sendiri. Kemiskinan itu tidak dapat dihindarkannya karena ia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari atau melenyapkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinannya. Karena kemiskinan sering ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin dalam lemahnya kemauan untuk maju, dan rendahnya produktivitas, maka orang miskin sering memberi kesan miskin karena kesalahannya sendiri.

Untuk mengentaskan penduduk miskin dari lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan diperlukan suatu kebijakan, komitmen, organisasi, dan

program, serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai obyek. Orang miskin harus dianggap sebagai manusia yang utuh dan merupakan subyek pembangunan. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang hanya mempunyai sedikit.

Dalam kasus di Indonesia, kemiskinan sudah banyak berkurang sejak pembangunan nasional berhasil menumbuhkan ekonomi nasional dengan rata-rata 7% per tahun selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP I). Pengurangan penduduk miskin cenderung melambat ketika yang dihadapi adalah kelompok penduduk yang benar-benar berada pada pusran utama kemiskinan (*core poverty*). Mereka itu adalah keluarga-keluarga paling miskin dari kelompok petani gurem dan buruh tani, nelayan kecil, peternak, dan warga desa yang bermukim tersebar di wilayah-wilayah pedalaman yang terisolasi.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin diperlukan adanya strategi penanggulangannya. Mubyarto merumuskan secara umum, yaitu pertama, mempercepat potensi ekonomi lapisan bawah masyarakat dan mendorong agar potensi itu dipercepat perkembangannya. Untuk itulah diluncurkan program-program penanggulangan kemiskinan sejak awal PJP I mewujudkan dalam berbagai bentuk, khususnya dalam bentuk program-program Inpres (Inpreas Bantuan Desa, Inpres Sekolah Dasar, InpresKesehatan, Inpres Desa Tertinggal, dan lain-lain). Kedua, mengembangkan ekonomi rakyat dengan melindungi rakyat dari persaingan tidak seimbang, serta mencegah

eksploitasi golongan ekonomi kuat atas yang lemah. Upaya untuk melindungi ekonomi rakyat tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat bawah secara menyeluruh. Ketiga, mendorong terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia melalui berbagai perangkat kebijakan di bidang keuangan sehingga dapat muncul lebih banyak Bank-Bank Perkreditan Rakyat yang melayani lapisan bawah masyarakat.

1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dituangkan melalui Inpres Nomor 5 Tahun 1993 merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pemerataan, yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 1994. Program IDT lahir dari konteks kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang diakui cenderung makin melebar pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I). Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi itu dianggap sudah mencapai tahap merisaukan yang jika dibiarkan akan dapat berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. Hal ini secara eksplisit dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993.

Konstansi rakyat melalui MPR ini merupakan pegangan dasar bagi pemerintah untuk menyusun suatu program nasional penanggulangan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi muncul bukan karena ada

kemandekan pembangunan, tetapi justru karena berhasilnya pembangunan ekonomi. Dalam proses mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi seperti sebelum krisis ekonomi tahun 1997, merupakan akses berbagai lapisan masyarakat kepada sumber-sumber daya pembangunan tidak merata, bahkan akses itu cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil anggota masyarakat.

Peluncuran program-program penanggulangan kemiskinan dan sekaligus program pemerataan melalui berbagai program Inpres selama PJP I merupakan bagian dari strategi umum pengurangan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Pada prinsipnya, pengurangan ketimpangan ekonomi dilakukan bukan dengan mengerem pertumbuhan kelompok-kelompok yang sudah maju ekonominya, melainkan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih tertinggal.

Program IDT sebagai langkah pemberdayaan yang langsung menimbulkan efek peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah yaitu melalui pemberian modal kerja langsung kepada penduduk miskin itu sendiri. Dana yang disalurkan berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 60 juta untuk setiap Desa Tertinggal yang jumlah seluruhnya pada tahun ketiga (1996/1997) mencapai 28.223 buah atau 44% dari seluruh desa di Indonesia.

Dana program ini mulai disalurkan pada tahun 1994/1995 kepada 20.633 Desa Tertinggal, tahun kedua (1995/1996) sebanyak 22.094 Desa

Tertinggal, dan tahun ketiga (1996/1997) sejumlah 22.054 buah desa tertinggal. Penduduk miskin menjadi pokmas (kelompok masyarakat) dengan anggota sekitar 30 KK untuk setiap pokmas. Jadi di suatu desa terdapat 100 KK miskin, maka di bentuk 3 atau 4 pokmas, terserah kesepakatan penduduk miskin itu sendiri. Dana IDT dibagi diantara kelompok-kelompok tersebut sesuai hasil musyawarah penduduk miskin. Filosofi program IDT adalah mempercayai penduduk miskin untuk memanfaatkan dana IDT seefisien dan seefektif mungkin untuk tujuan-tujuan produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Hasil yang tercapai setelah program ini berjalan tiga tahun sangat menggembarakan. Dari desa-desa IDT dilaporkan berbagai perkembangan yang membesarkan hati. Ada anggota pokmas dari NTT melaporkan kenaikan pendapatannya sebesar 500% setelah memanfaatkan dana IDT. Dari Pulau Enggano dilaporkan bahwa lahan persawahan yang dibuka dengan biaya dari dana IDT telah memberikan hasil 4 ton gabah kering punggut per hektar, sehingga kebutuhan besar penduduk tercukupi. Para petani dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan, melaporkan telah memperoleh panen kentang dan bawang di atas lahan yang selama ini merupakan lahan tidur dan baru dimanfaatkan setelah masuknya program IDT.

Program IDT juga secara berlahan-lahan tetapi pasti membawa perubahan di dalam wawasan dan sikap Aparat Pemerintah. Pendekatan aparat yang selama ini cenderung "memberi" mulai berubah menjadi

"membina" dan "memberdayakan". Aparat Pemerintah tidak lagi merasa paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, karena disadari bahwa masyarakat memang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan. Pemantauan pelaksanaan program IDT di desa-desa tertinggal oleh pejabat Pemerintah dari pusat atau daerah memungkinkan mereka dapat berdiskusi dengan penduduk miskin tentang keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan mereka dalam pelaksanaan program IDT. Para pejabat tidak lagi begitu mudah menyatakan faktor-faktor apa saja penyebab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program ini, melainkan pertama-tama mendengarkan dari masyarakat berbagai masukan yang ingin mereka sampaikan agar program ini lebih berhasil.

Pada tahun pertama pelaksanaan program IDT menggunakan pendekatan *top down*, tetapi sebagian pelaksanaannya gagal. Setelah memasuki tahun kedua pelaksanaan program IDT, Aparat Pemerintah daerah menyadari bahwa penentuan jenis usaha dari atas akan lebih besar kemungkinannya gagal dari pada berhasil. Ketika diserahkan kepada penduduk di desa itu untuk memilih jenis usaha sendiri, ternyata mereka lebih suka meneruskan jenis usaha yang selama ini mereka tekuni seperti menangkap ikan di sungai dan mengumpulkan rotan di hutan. Dana IDT mereka gunakan untuk membeli jaring, pukot, pancing, dan berbagai alat penangkapan ikan yang diperlukan, dan yang paling sesuai dengan jangkauan modal yang diperoleh. Hasilnya, penduduk miskin mulai dapat mengembalikan modal usaha yang untuk seterusnya dapat digulirkan

kepada anggota lain yang memerlukan, atau mereka menjamin lagi setelah pinjamannya lunas. Dana IDT diterima pokmas sebagai hibah dari Pemerintah namun pokmas meneruskannya kepada anggotanya sebagai pinjaman. Dana ini sudah menjadi modal usaha yang abadi dan dikelola oleh pokmas sesuai sistem dan mekanisme yang disepakati oleh para anggota. Jumlah kelompok masyarakat penerima dana IDT yang sudah terbentuk adalah 106.960 pokmas, dengan anggota 2.873.812 keluarga, kira-kira 12,6 juta orang.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2000, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih tergolong besar meskipun jumlahnya berangsur-angsur menurun, dari tahun 1984 adalah 6,5 juta (24,17%), tahun 1987 turun menjadi 5,55 juta (19,125), tahun 1990 sebesar 4,9 juta (17,49%) tahun 1993 turun menjadi 4,61 juta (15,78%). Sejak tahun 1996, kemudian pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi, sehingga jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 6,4 juta (21,61%) tahun 1996 meningkat menjadi 8,75 juta (28,46%) pada tahun 1999. Penduduk miskin tersebut sebagian besar bermukim di desa-desa yang tergolong tertinggal. Data desa tertinggal dan penduduk miskin dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Data pada lampiran ini menunjukkan bahwa jumlah KK pada tahun 2000 adalah 7.753.433 KK dan 61% KK tersebut adalah tergolong miskin. Pada tahun 1999 jumlah KK sebesar 7.489.755 KK, 58% KK-nya miskin. Kemudian tahun 1998 jumlah KK sejumlah 7.273.183 KK,

50% adalah miskin dan pada tahun 1997 berjumlah 7.114.568 KK, 53% adalah KK miskin. Selama kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 1997-2000 rata-rata jumlah KK miskin di Jawa Tengah adalah 55%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk di Jawa Tengah adalah miskin.

Oleh karena itu masalah pengentasan penduduk miskin menjadi masalah yang serius untuk ditangani Pemerintah. Salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 5 tahun 1993 tentang Desa Tertinggal yang digulirkan Pemerintah sejak tahun 1997.

2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang Desa Tertinggal. Program ini dimunculkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada tahun 1997. Secara khusus program PPK ini dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan prasarana serta sarana pedesaan, dengan cakupan jenis kegiatan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. PPK ini juga diarahkan untuk menangani daerah yang mengalami masalah krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran, kekeringan serta banjir yang menyebabkan rawan pangan.

Pengelolaan PPK ini diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan melalui Musyawarah Desa.

Tujuan umum dari PPK adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan Aparat Desa yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, (2) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan, (3) menyediakan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, (4) meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sasaran utama penerima bantuan dana PPK adalah penduduk miskin, yang berada dikecamatan miskin dengan prioritas yaitu, (1) Kecamatan yang mempunyai jumlah Desa Tertinggal relatif lebih banyak, (2) Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin

relatif lebih banyak, (3) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) telah terbentuk dan berjalan serta (4) Adalah kecamatan-kecamatan yang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan kecamatan-kecamatan yang sering mengalami bencana baik kekeringan maupun banjir.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memperoleh bantuan dana program PPK dari Tahun Pertama (1998/1999), Tahun kedua (1999/2000 dan Tahun Ketiga (2000/2001).

Tentang besarnya dana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 1
DANA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
DI PROPINSI JAWA TENGAH

No	Tahun	Jumlah Dana	Jml Kab. yang Memperoleh dana PPK
1	1998/1999	42.500.000.000,-	14 Kab
2	1999/2000	84.000.000.000,-	16 Kab
3	2000/2001	117.250.000.000,-	17 Kab

Sumber ; Konsultan PPK Prop. Jateng, 2001

Data diatas menunjukkan rata-rata 44 % dari jumlah kab/kota yang ada di Jawa Tengah telah memperoleh bantuan dana dari Program Pengembangan Kecamatan termasuk Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak, adalah daerah yang letak geografisnya di daerah pesisir pantai utara, sebelah barat perbatasan dengan Kota Semarang dan sebelah timur Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Luas wilayah Kabupaten Demak 89,793 ha yang terbagi dalam 13 Kecamatan dan 247 Desa. Dan yang yang tergolong kriteria desa miskin adalah 58 desa. 13 Kecamatan itu adalah Mranggen, Karangawen, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Demak, Wonosalam, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, dan Wedung. Jumlah penduduk di kabupaten Demak adalah 951.520 KK dan 49,57% diantaranya adalah penduduk miskin.

Kabupaten Demak telah mendapat bantuan dana PPK, karena disamping 49,57% jumlah KK-nya adalah miskin, daerah tersebut adalah termasuk daerah yang sering mengalami kekeringan dan banjir sehingga menyebabkan rawan pangan dan oleh Program PPK ini dianggap sebagai target daerah yang layak menerima bantuan dana tersebut. Mengenai besarnya jumlah dana PPK di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel : 2
DANA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
DI KABUPATEN DEMAK

No	Tahun	Jumlah Dana	Jml Kec. Penerima dana
1	1998/1999	3.500.000.000,-	5
2	1999/2000	5.750.000.000,-	6
3	2000/2001	7.000.000.000,-	7

Sumber : Sekretariat PPK, Kab Demak, 2002

Dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha produktif yaitu melalui pemberian modal usaha dan untuk pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Pada Tahun Pertama (1998/1999) telah mendapatkan dana sejumlah Rp. 3.500.000.000,- dan Rp. 887.154.000,- untuk usaha produktif selebihnya yaitu Rp. 2.612.846.000,- untuk pengembangan prasarana dan sarana fisik. Pada Tahun Kedua (1999/2000) mendapatkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Rp. 2.028.728.000,- untuk usaha produktif sedangkan Rp. 2.971.272.000,- digunakan untuk membangun prasarana fisik. Kemudian pada Tahun Ketiga (2000/2001) mendapat dana sejumlah Rp. 7.000.000.000,- dan Rp. 1.741.121.000,- untuk usaha produktif dan Rp. 5.258.879.000,- adalah untuk pengembangan prasarana dan sarana fisik.

Pengembangan usaha produktif di Kabupaten Demak dimanfaatkan untuk pemberian modal usaha yaitu diantaranya ternak sapi, itik; Bakulan; Kerajinan sangkar burung; Kerajinan ukir; Pembuatan perahu; pembuatan parut; dan untuk simpan pinjam. Sedangkan untuk pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan makadam, sirtu, aspal; jalan beton, paving; jembatan; irigasi; bendungan; pintu air; talut; air bersih; gorong-gorong; pompanisasi; normalisasi sungai; pasar dan lain-lain.

Menurut Data laporan Konsultan Manajemen Program Pengembangan Kecamatan Propinsi Jawa Tengah periode Bulan Maret 2002, bahwa dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Demak didapatkan permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Dana untuk usaha produktif khususnya pada Tahun Pertama (1998/1999) banyak mengalami kendala dalam hal angsuran. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sosialisasi program PPK yang belum optimal sehingga belum tepat sasaran yaitu masyarakat miskin potensial dan produktif dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan oknum pribadi. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pengaruh dari program-program lain yang mengalami kegagalan dalam angsuran dan tidak ada tindak lanjut yang jelas sehingga menganggap bahwa dana PPK adalah sama dengan dana program-program lain, gagalnya usaha dan gagalnya panen serta turunnya harga jual hasil pertanian dan usaha.

Pada Tahun Pertama (1998/1999) total pinjaman untuk usaha produktif sebesar Rp. 1.064.297.600,- sampai dengan Bulan Maret 2002 masih terjadi tunggakan angsuran sebesar Rp. 288.900.371,-. Pada Tahun Kedua (1999/2000) dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.369.498.000,- sampai dengan Bulan Maret 2002 juga mengalami tunggakan angsuran sebesar Rp. 377.008.203,-. Jadi jumlah total

pada Tahun Pertama dan Kedua adalah sebesar Rp. 3.433.795.600,- telah terjadi tunggakan sebesar Rp. 665.908.574. Dan untuk mengetahui lebih detail tentang besar dan kecilnya tunggakan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel : 3
TUNGGAKAN ANGSURAN DANA PPK
DI KABUPATEN DEMAK, TAHUN PERTAMA (1998/1999)
PERIODE MARET 2002

No	Nama Kecamatan	Pokok Pinjaman	Bunga yg hrs dibayar	Total Pinjaman bunga+Bunga	Kumulatif Tunggakan	Rasio antara Total pinjaman dg tunggakan (%)	Jml Klp	Jml Anggota
1	Bonang	229.380.000	40.586.000	269.966.000	59.959.000	22,21	39	651
2	Mranggen	194.530.000	34.990.100	229.520.100	62.891.409	27,41	47	897
3	Karanganyar	229.157.000	45.831.400	274.988.400	83.730.757	30,45	43	324
4	Karangtengah	89.187.000	26.756.100	115.943.100	15.461.650	13,34	3	105
5	Wedung	144.900.000	28.980.000	173.880.000	62.656.300	36,04	7	418
	Jumlah	887.154.000	177.143.600	1.064.297.600	288.900.371	27,15	139	2.395

Sumber : Konsultan PPK Prop. Jateng, 2002

Data diatas menunjukkan bahwa tunggakan dana PPK paling besar pada Tahun Pertama (1998/1999) di Demak adalah Kecamatan Wedung yaitu sebesar 36,04% dari total pinjaman Rp. 173.880.000,-, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Karangtengah yaitu sebesar 13,34% dari total pinjaman Rp. 115.943.100,-

Tabel : 4
TUNGGAKAN ANGSURAN DANA PPK
DI KABUPATEN DEMAK, TAHUN KEDUA (1999/2000)
PERIODE MARET 2002

No	Nama Kecamatan	Pokok Pinjaman	Bunga yg hrs dibayar	Total Pinjaman Pokok+Bung	Kumulatif Tun ggakan	Rasio antara Total pinjaman dg tunggakan (%)	Jml Klp	Jml Anggota
1	Bonang	267.335.000	52.270.000	319.605.000	74.020.800	23,16	59	1080
2	Mranggen	323.973.000	58.875.600	382.848.600	78.720.478	20,57	71	555
3	Karanganyar	635.750.000	107.400.500	743.150.500	28.393.345	3,82	112	1399
4	Karangtengah	166.250.000	26.932.500	193.182.500	33.852.052	17,53	15	332
5	Wedung	305.270.000	36.632.400	341.902.400	109.792.950	32,12	31	499
6	Demak	330.150.000	58.659.000	388.809.000	62.839.025	16,17	88	1570
	Jumlah	2.028.728.000	340.770.000	2.369.498.000	387.618.650	16,36	376	5435

Sumber : Konsultan PPK Propinsi Jateng, 2002

Tunggakan dana PPK paling besar pada Tahun Kedua (1999/2000) adalah di Kecamatan Wedung yaitu sebesar 32,12% dari total pinjaman Rp. 341.902.400,-. Sementara tunggakan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Karanganyar yaitu sebesar 3,83% dari total pinjaman Rp. 743.150.500,-

2. Dana untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun, yang didapatkan dari hasil pungutan pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut belum bisa untuk menutup kerusakan prasarana yang mengalami kerusakan parah. Dana yang terkumpul hanya mampu untuk memelihara prasarana supaya tidak lebih parah. Sementara itu di tempat yang lain bahwa dana yang sudah terkumpul dari hasil pungutan prasarana yang seharusnya dimanfaatkan untuk pemeliharaan tidak secepatnya digunakan sehingga hal ini menyebabkan kondisi prasarana semakin rusak.

3. Pelaksanaan pekerjaan fisik mengalami misalnya pekerjaan Bendung Gerak di Desa Tedunan Kecamatan Wedung tidak sempurna, sehingga tidak bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Masih lemahnya pembinaan terhadap kelompok masyarakat mengingat kelompok masyarakat miskin sarat dengan minimnya sumber daya manusia, baik dari tingkat pendidikannya, keterampilan maupun pengalamannya. Pelatihan administrasi memang sudah dilakukan akan tetapi hanya bagi pengelola di desa untuk membantu dalam pembuatan administrasi dan pelaporan.
4. Media komunikasi misalnya papan informasi pembuatannya masih kurang menarik, kurang komunikatif dan kadangkala ditempatkan pada tempat-tempat yang kurang strategis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa kaitannya dengan rasa ingin tahunya, karena kebiasaan membaca informasi bagi masyarakat desa sangat minim.
5. Koordinasi kurang berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi permasalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan PPK, maka penyelesaiannya sering terlambat yang kemudian menyebabkan penyimpangannya semakin besar. Hal ini disebabkan karena koordinasi harus dilakukan secara formal dan prosedural yaitu melalui pertemuan langsung antara Konsultan Manajemen PPK Kabupaten dengan Tim Koordinasi PPK Kabupaten dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan bukti-bukti permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Demak tersebut, maka penulis berasumsi bahwa implementasi program PPK tersebut adalah masih lemah. Penulis memprediksikan bahwa yang menyebabkan masih lemahnya implementasi PPK tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pelaksana program dan kualitas manajemen program. Kondisi demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masih lemahnya implementasi program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Wedung.

Untuk mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan masih lemahnya implementasi PPK tersebut, maka penulis akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan manajemen dari para ahli. Faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan penyebab lemahnya Implementasi PPK di Demak adalah Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada implementasi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada Tahun Pertama (1998/1999) dan Tahun Kedua (1999/2000). Menurut data laporan konsultan PPK periode Maret 2002 Kecamatan Wedung merupakan salah satu Kecamatan yang paling lemah dalam mengimplementasikan PPK karena banyaknya

permasalahan termasuk dalam hal ini adalah tunggakan angsuran terbesar.

B Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Demak pada Tahun Pertama (1998/1999) dan Tahun Kedua (1999/2000) dalam pelaksanaannya sampai dengan Bulan Maret 2002 telah ditemukan berbagai permasalahan dan kendala seperti disebutkan pada bagian latar belakang sebagai berikut :

- a) Telah terjadi tunggakan angsuran untuk usaha produktif sebesar Rp. 665.908.574,- dari total pinjaman sejumlah Rp. 3.433.795.600,- untuk tahun I (1998/1999) dan tahun II (1999/2000). Dari 11 Kecamatan yang memperoleh bantuan dana PPK, Kecamatan Wedung adalah kecamatan paling tinggi mengalami tunggakan angsuran yaitu sebesar 36,04% pada tahun I dan 33,12% pada tahun II.
- b) Dana untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang didapat dari hasil pungutan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah terbangun tersebut tidak sebanding dengan dana yang dibutuhkan untuk perbaikan prasarana dan sarana yang rusak. Hal ini menyebabkan kondisi prasarana dan sarana seperti jalan kondisinya semakin parah.
- c) Pembangunan fisik seperti pekerjaan Bendung Gerak di desa Tedunan Kec. Wedung, belum bisa dimanfaatkan warga karena kondisi

bangunan tersebut tidak sempurna, sehingga tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan bangunan tersebut terbengkelai.

- d) Masih kurangnya pembinaan kepada kelompok masyarakat sebagai partisipasi program.
- e) Media komunikasi seperti papan pengumuman dan lain-lain masih kurang menarik dan sangat terbatas.
- f) Lemahnya koordinasi yang menyebabkan keterlambatan dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang muncul.

2. Perumusan Masalah

Berpijak dari identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ada hubungan komunikasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
- b. Apakah ada hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
- c. Apakah ada hubungan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?
- d. Apakah ada hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi, dan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis hubungan Komunikasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis hubungan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
4. Untuk menganalisis hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi, dan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

D Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini adalah kajian ilmiah yang diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya khususnya penelitian implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, menjadi masukan bagi praktisi pembangunan khususnya Bappeda Propinsi Jateng, Bappeda Kabupaten Demak, Konsultan PPK baik di Propinsi maupun di Kabupaten Demak, Tim Koordinasi PPK di Propinsi dan Kabupaten Demak serta masyarakat pada umumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengkajian Teoritis

1. Kebijakan Publik

Menurut pandangan Wahab (2001:2) bahwa "istilah *policy* seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar". Seorang ahli kebijakan, Anderson (1978), merumuskan kebijakan "sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu" (dalam Wahab,2001:2). Makna kebijakan menurut pandangan Eulau dan Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Jones, yang menyatakan bahwa "*Policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it*" (dalam Soenarko,2000:41). Kebijakan merupakan suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi.

Seorang ilmuwan politik, Fredrich juga menyatakan bahwa kebijakan adalah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (dalam Wahab, 2001:3).

Sedangkan arti kebijakan publik oleh para ahli diartikan juga sebagai kebijakan pemerintah atau kebijakan negara Menurut Jenkins (1978), merumuskan kebijakan negara sebagai "*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*" (dalam Wahab, 2001:4). Kebijakan negara merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Anderson juga menyampaikan definisi kebijakan publik "*Public Policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*" (dalam Soenarko, 2000: 42). Kebijakan Pemerintah merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan

dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Udoji (1981), mengartikan bahwa kebijakan negara adalah sebagai "*a sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*" (dalam Wahab, 2001:5). Kebijakan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat diketemukan ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik, *pertama*, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. *Kedua*, kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, kebijakan publik bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam menggalakkan program penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, kebijakan negara dapat berbentuk positif dan negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuk

yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Jadi hakikat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public Interest*). Kepentingan rakyat itu merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat

2. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep Implementasi kebijakan publik dalam banyak literatur kebijakan publik sesungguhnya cukup bervariasi. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan publik Grindle (1980:6) menyebutkan bahwa "*public policies broad statements of goals, objectives, and means are translated into action programs that aim to achieve the ends stated in the policy*". Lebih lanjut Grindle (1980:7) menyatakan bahwa "*Implementation ... a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level*".

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan publik adalah untuk menetapkan arah agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Hal ini akan menyangkut pada pensiptaan sistem pelaksanaan kebijakan yang merupakan alat yang disusun untuk

mencapai tujuan kebijakan atau program. Lebih lanjut pandangan Grindle di atas adalah keseluruhan proses penerapan kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan program. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi dasar bagi pelaksanaan kebijakan publik apapun.

Sedangkan menurut Bardach (1979:57), menyebutkan bahwa *"Implementation process is (1) process of assembling the elements required to produce a particular programmatic outcome, and (2) the playing out of a number loosely interrelated games where by the elements are withheld from or delivered to the program assembly process on particular terms"*.

Jones (1981:165) juga memberikan pandangan mengenai implementasi kebijakan yaitu :

"Implementation is easy to understand in the abstract. Getting the job done and doing it common shorthand definitions of the term. But doing it is not always so simple. It may not be a well defined object; doing may require more people. Under these circumstances, implementation is a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done".

Pernyataan Jones di atas menyimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidaklah sesederhana sebagaimana yang dirumuskan. Kebijakan yang didefinisikan diatas lebih merupakan tindakan yang mengarah pada

suatu tujuan, baik menyangkut apa yang senyatanya dilakukan atau tidak dilakukan oleh *policy makers* dan atau pelaksana kebijakan.

Pandangan beberapa ahli di atas tentang implementasi kebijakan juga menunjukkan berbagai kausalitas antara pelaksanaan kebijakan (*policy action*) dengan pencapaian tujuan kebijakan. Selain itu tahapan implementasi dipandang sebagai aktivitas fungsional yang dilaksanakan setelah aktivitas formulasi, legitimasi dan penganggaran kebijakan (dalam Jones, 1991:53). Produk implementasi ini sangat bervariasi, yaitu dapat berupa pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan, dan lain-lain dari suatu masalah kebijakan. Karena itu menurut Jones (1991:294) implementasi sangat interaktif dengan kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Begitu pula Pressman dan Wildavsky (1991:295) mengatakan bahwa implementasi yang diterjemahkan sebagai :

“penerapan” mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya ... Pelaksanaan atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tak nampak ... Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Tetapi menurut Walter Williams (1991:295) masalah yang paling penting dalam implementasi adalah :

“Hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah : bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang

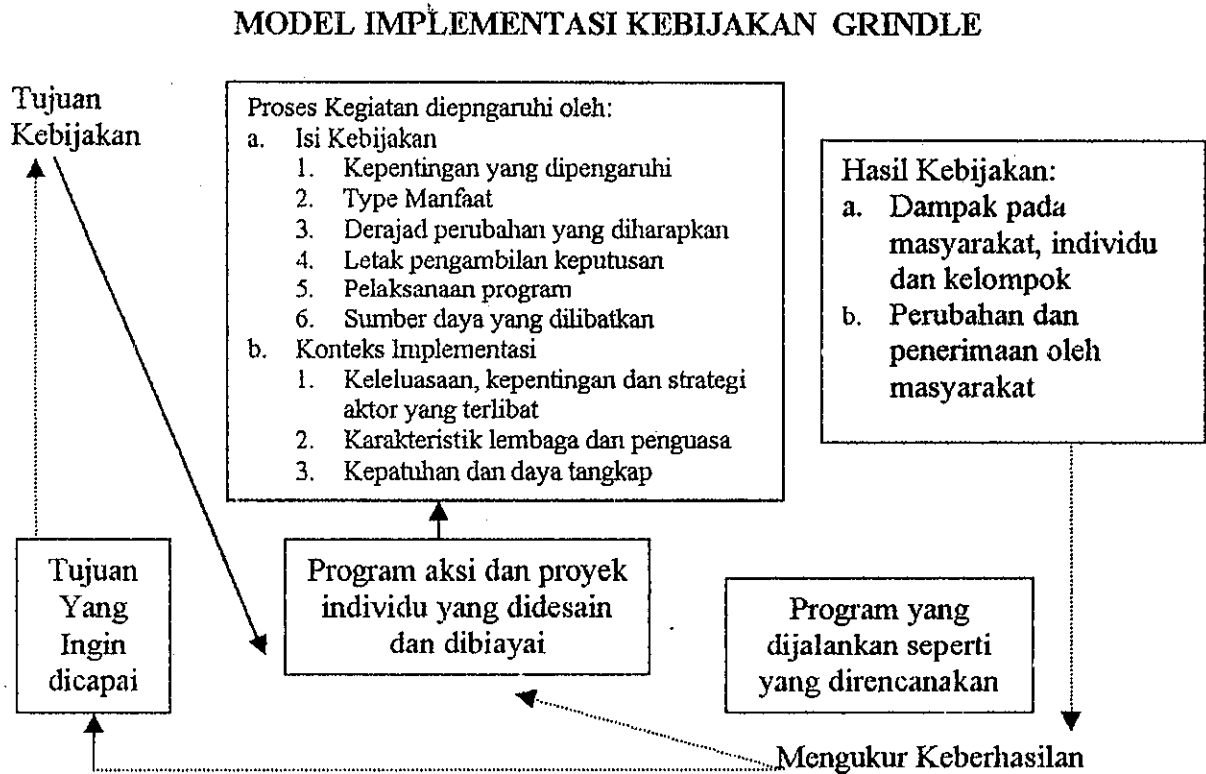
pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan”

Jika dipahami secara mendalam definisi-definisi implementasi dari para ahli tersebut diatas hanya menyangkut dua hal yaitu implementasi sebagai proses dan pencapaian tujuan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut setelah sebuah kebijakan/program itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan

Penelitian ini berangkat dari dua model implementasi program yaitu model implementasi dari Grindle dan Edward III. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle. Grindle (1980:11) mengemukakan bahwa aktivitas-aktivitas implementasi dalam suatu proses politik dan administratif dipengaruhi oleh “*content of policy and context of implementation*”. Yang termasuk *content of policy* adalah (1) *interests effected*, (2) *type of benefits*, (3) *extent of change envisioned*, (4) *site of decision making*, (5) *program implementors*, (6) *resources committed*. Sedangkan yang termasuk *context of implementation* yakni (1) *power, interest, and strategies of actors involved*, (2) *institution and regime characteristics*, (3) *compliance and responsiveness*. Grindle (dalam Wibawa, 1992:26) mengatakan “menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dengan hasil-hasil kegiatan pemerintah. Karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan dimana perangkat khusus didesain dengan harapan

untuk mencapai tujuan akhir". Lebih lanjut Wibawa menggambarkan model implementasi menurut Grindle sebagai berikut :

Gambar : 1



Berkaitan dengan *content of policy* atau isi kebijakan, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa sebuah kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila isi kebijakan menyangkut banyak kepentingan didalamnya. Begitu pula sebuah kebijakan atau program yang jelas memberikan manfaat akan lebih mudah dilaksanakan. Tipe manfaat juga berkaitan dengan derajat perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan. Selain itu program juga akan kesulitan dalam mengimplementasikan jika terlalu menuntut perubahan sikap

dan perilaku kelompok sasaran. Kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang secara nyata memberikan manfaat langsung terhadap kelompok sasaran.

Isi sebuah kebijakan juga menunjukkan posisi pengambilan keputusan. Kebijakan dibidang tertentu biasanya diputuskan oleh sejumlah besar unit pengambil kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu lainnya yang hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Implikasi dari jumlah pengambil keputusan adalah semakin banyak yang terlibat akan semakin menyulitkan di dalam implementasi programnya.

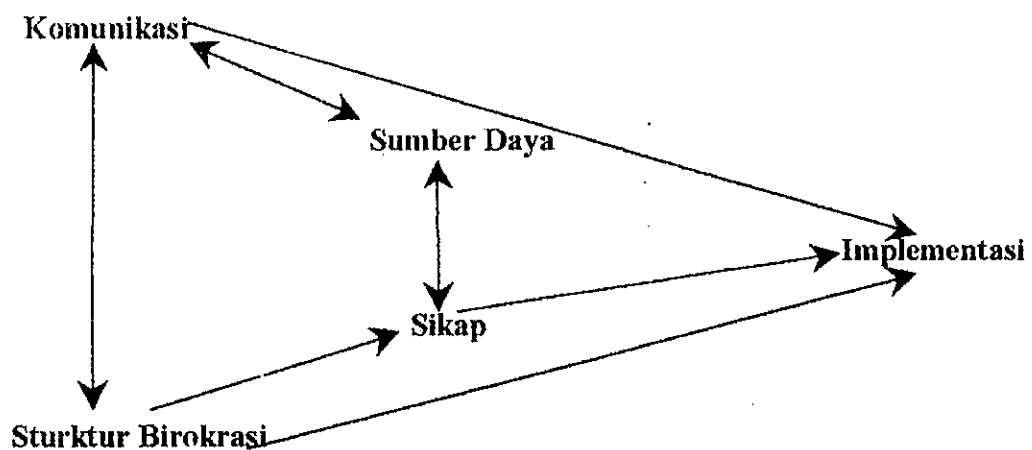
Keputusan-keputusan yang dibuat selama formulasi kebijakan juga menunjukkan siapa yang bertanggung jawab di dalam implementasi programnya, dan keputusan-keputusan seperti ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Dan perbedaan pada kapasitas lembaga pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan program.

Selain mempertimbangkan variabel isi kebijakan, maka variabel *context* implementasi kebijakan juga perlu mendapat pertimbangan. Pada saat implementasi kebijakan berlangsung banyak sekali aktor lain yang akan mempengaruhi kebijakan, misalnya dalam hal alokasi sumber daya publik. Aktor tersebut dapat berupa perencana, politisi, elite ekonomi, kelompok sasaran maupun pelaksana kebijakan.

Model proses Implementasi Kebijakan menurut Edwards III (dalam Purnaweni, 1991:3) mengemukakan empat variabel yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada implementasi kebijakan publik, yaitu "*communication, resources, dispositions, and bureaucratic structur*". Hubungan antara variabel tersebut oleh Edwards III digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 2

MODEL IMPLEMENTASI EDWARDS III



Keempat faktor atau variabel yang dikemukakan Edwards III di atas dikatakannya sebagai syarat terpenting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

- a. Komunikasi; merupakan proses menyalurkan informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
- b. Sumber-sumber daya (*Resources*); dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
- c. Sikap-sikap (*Disposisi*); sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
- d. Struktur Birokrasi; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standard Operating Procedures*) atau prosedur standar pelaksanaan dan fragmentasi. SOPs dapat mempengaruhi implementasi yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Dari kedua model implementasi tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu program lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yaitu kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga lebih bersifat eksternal. Sementara menurut Edward III bahwa keberhasilan implementasi suatu program lebih ditekankan pada faktor-faktor internal, yaitu lebih dekat kepada manajemen program itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah berkaitan dengan manajemen program atau faktor-faktor internal, maka sebagai pijakan teori dalam penelitian ini adalah mengikuti model implementasi Edward III. Penulis akan mengadopsi dua variabel yang ada yaitu komunikasi dan sumber daya yang berkaitan erat dengan kemampuan organisasi. Sementara itu variabel pengawasan mengadopsi dari fungsi-fungsi manajemen dari Harold Koontz. Fungsi-fungsi manajemen itu meliputi *Planning, Organizing, Staffing, Leading, dan Controlling*. (manullang, 1982:19)

Planning merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, dimana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai.

Organizing dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Staffing sangat berkaitan erat dengan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

Leading mempunyai kegiatan meliputi yakni mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara atasan dan bawahan, memberi semangat inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka trampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Controlling, sering juga disebut pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan pengamatan, penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula.

Dalam penelitian ini variabel implementasi PPK dimunculkan dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proses

- 1) Penyediaan dana untuk modal usaha produktif dan pengembangan prasarana dan sarana desa.
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengembangan ekonomi pedesaan.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pedesaan dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin desa.
- 3) Memperluas kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa dalam melaksanakan program pembangunan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

... Diatas telah disebutkan bahwa temuan-temuan permasalahan tentang Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan pengawasan, oleh karena itu asumsi penulis bahwa teori yang representatif untuk mengulas permasalahan tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III. Edward III mengatakan bahwa ada 4 variabel yang mempengaruhi proses

implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi dan variabel yang akan diadopsi untuk penelitian ini adalah Komunikasi dan Sumber Daya sebagai unsur Kemampuan Organisasi Pelaksana. Sedangkan variabel pengawasan akan diadopsi dari fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Harold Koontz. Untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi PPK tersebut akan diurai sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam masyarakat. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan.

Menurut Hovland, Jenis dan Kelly (1981), mengatakan bahwa "*Communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals*" (dalam Arni Muhammad, 2001:2). Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.

Louis Forsdale (1981) mengatakan "*Communication is the process by which a system is established, maintained, and altered by means of shared signals that operate according to rules*". Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa verbal dan non verbal yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima signal yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal yang diterimanya. Pemberian signal dalam komunikasi dapat dilakukan dengan maksud tertentu atau dengan disadari dan dapat juga terjadi tanpa disadari.

Menurut Brent D. Ruben (1988) memberikan definisi mengenai komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain.

Sedangkan istilah informasi diartikan sebagai kumpulan data, pesan (*message*) susunan isyarat dalam cara tertentu yang mempunyai arti atau berguna bagi sistem tertentu. Pengertian informasi disini tidak hanya bersifat fakta tetapi juga bersifat fiksi, humor atau bujukan. Istilah menciptakan informasi yang dimaksudkan Ruben adalah tindakan menyandikan (*encoding*) pesan yang berarti, kumpulan data atau suatu set

isyarat. Sedangkan istilah mengirimkan informasi maksudnya adalah proses dengan mana pesan dipindahkan dari si pengirim kepada orang lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Pesan dikirim melalui bahasa baik bahasa verbal maupun bahasa non verbal. Sementara istilah pemakian informasi menunjuk kepada peranan informasi dalam mempengaruhi tingkah laku manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi menurut Ruben bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain.

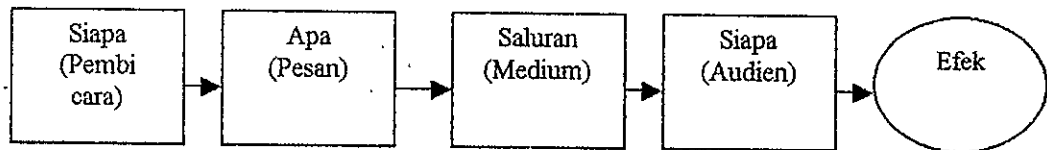
Sementara menurut Arni Muhammad (2001:4) mengatakan bahwa "Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku". Si pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, tim, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok dalam organisasi atau masyarakat. Perubahan tingkah laku maksudnya dalam pengertian yang luas yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri individu mungkin dalam aspek kognitif, efektif atau psikomotor.

Beberapa model komunikasi antara lain model Harold Lasswell (1981), dia menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu *who* (siapa), *says what* (mengatakan apa), *in which medium* atau dalam media apa, *to whom* atau

kepada siapa, dan dengan *what effect* atau apa efeknya. Gambaran model Lasswell tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar : 3

MODEL KOMUNIKASI LASSWELL



Who adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau tim.

Says what atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Kadang-kadang orang perlu mengorganisir lebih dahulu apa yang akan disampaikan sebelum mengkomunikasikannya. Isi yang dikomunikasikan ini kadang-kadang sederhana dan kadang-kadang sulit dan kompleks.

To whom, maksudnya adalah menanyakan siapa yang menjadi *audience* atau penerima dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara atau kepada siapa pesan yang ia ingin sampaikan diberikan. Hal ini perlu diperhatikan karena penerima pesan ini berbeda dalam banyak hal misalnya, pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya dan usianya..

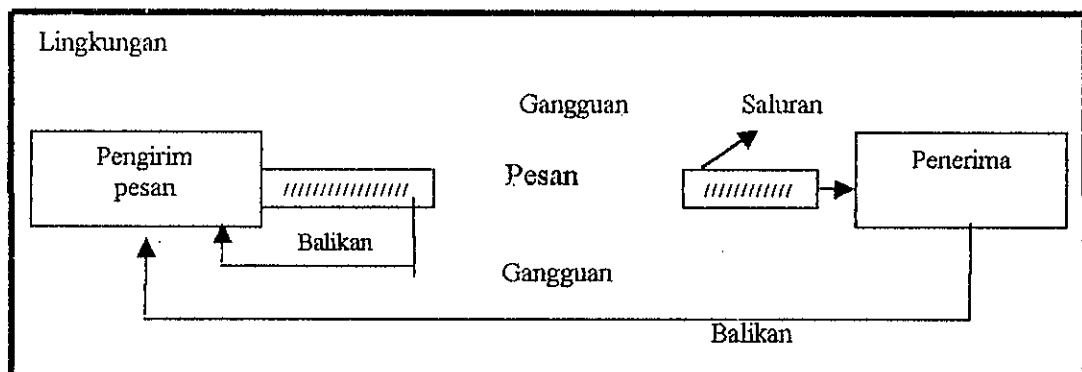
In which medium atau melalui media apa. Yang dimaksud dengan media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, radio, televisi, surat, buku, gambar dan papan-papan pengumuman. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah tidak semua media itu cocok untuk maksud tertentu. Kadang-kadang suatu media lebih efisien digunakan untuk maksud tertentu tetapi untuk maksud yang lain tidak.

What effect atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal penting yaitu *pertama*, apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan *kedua*, apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.

Sedangkan menurut William J. Seiler (1988) memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal.

Gambar : 4

MODEL KOMUNIKASI DUA ARAH
(SEILER, 1988)



Source atau: pengirim pesan mempunyai 4 peranan yaitu menentukan arti apa yang akan dikomunikasikan, menyandikan arti ke dalam suatu

pesan dan mengamati dan bereaksi terhadap respons dari penerima pesan. Pengertian pesan adalah sama dengan stimulus yang dihasilkan oleh sumber. Setiap stimulus yang mempengaruhi penerima adalah suatu pesan apakah itu disengaja atau tidak.

Suatu pesan yang diciptakan akan berbeda-beda dari pesan-pesan yang lain walaupun bahkan pesan itu diciptakan sama dari waktu ke waktu, tetapi akan berbeda karena pesan tidak dapat diulangi atau diterima dalam cara yang persis sama.

Istilah saluran yang dimaksudkan dalam model ini adalah jalan yang dilalui pesan dari sumber kepada penerima. Saluran komunikasi yang biasa adalah gelombang suara dan gelombang cahaya sehingga kita dapat mendengar dan melihat satu sama lain.

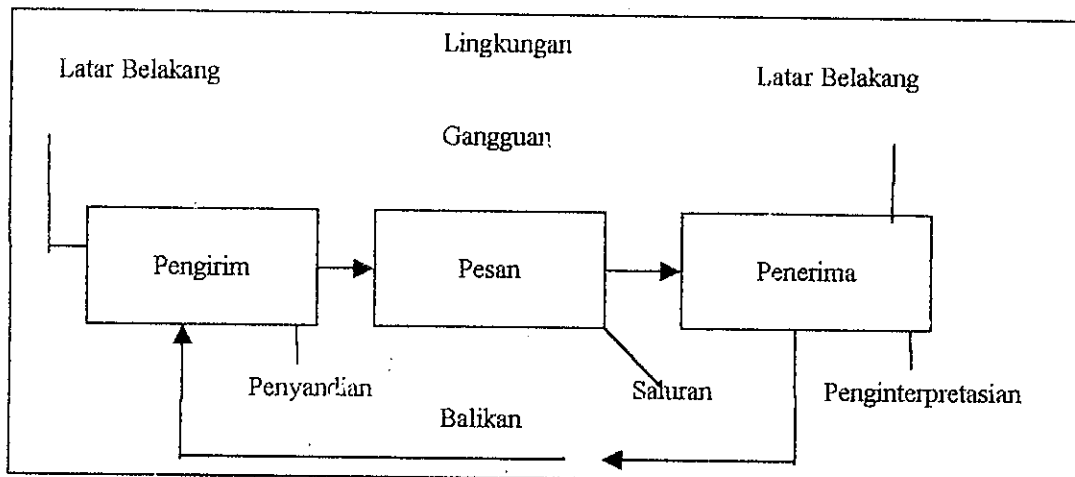
Sedangkan komponen penerima menurut Seiler dapat seorang individu atau banyak individu yang mempunyai tugas menganalisis dan menginterpretasikan pesan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya si penerima mempunyai peranan tertentu dalam komunikasi yaitu sebagai berikut : *pertama*, menerima pesan dapat dilakukan dengan mendengarkan, melihat, dan merasakan. *Kedua*, mengikuti pesan yang dimaksudkan untuk mereka dengan memusatkan perhatian kepada stimulus tertentu dan menghilangkan gangguan yang dapat mengganggu si penerima. *Ketiga*, menginterpretasikan dan menganalisis pesan. *Keempat*, menyimpan dan mengingat kembali pesan.

Kemampuan menyimpan dan mengingat kembali adalah berbeda pada tiap orang. Ada orang yang dapat menyimpan dan mengingat kembali dengan cepat dan ada pula yang sering lupa tentang pesan yang telah disimpannya. *Kelima*, Berespons terhadap pengirim pesan, saluran, lingkungan, gangguan dan pesan. Respons terhadap suatu pesan mungkin berupa komentar bahwa pesan sudah diterima, dan dapat juga berupa anggukan kepala atau gelengan kepala sebagai tanda bahwa pesan tidak dipahami atau meminta informasi yang lebih banyak.

Sedangkan menurut Arni Muhammad (2001:15) model komunikasi digambar seperti di bawah ini :

Gambar : 5

MODEL KOMUNIKASI DUA ARAH
(ARNI MUHAMMAD)



Model ini menekankan adanya faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap proses komunikasi. Diantaranya yang digambarkan disini adalah faktor latar belakang dari si pengirim pesan dan si penerima pesan. Yang

dimaksudkan dengan latar belakang adalah hal-hal yang ada pada individu yang ikut mempengaruhinya dalam proses penyandian pesan dan penginterpretasian pesan.⁵ Misalnya pengalamannya, pengetahuannya, ketrampilan berkomunikasi, keadaan sosialnya, dan sikap. Faktor *kedua* adalah lingkungan fisik atau situasi dimana komunikasi itu terjadi. Faktor *ketiga* yang juga ikut berpengaruh adalah gangguan (*noise*). Gangguan ini mungkin terjadi pada waktu penyampain pesan atau pada waktu penerimaan pesan.

Kedua model komunikasi dua arah tersebut diatas memberikan gambaran bahwa alur pesan atau informasi dari komunikator ke komunikan telah terjadi umpan balik. Hal ini sejalan dengan proses jaringan komunikasi yang dikemukakan oleh Arni Muhammad.

Organisasi sebagai komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan melalui jalan tertentu yang dinamakan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya misalnya mungkin hanya diantara dua orang, tiga atau lebih dan mungkin juga diantara keseluruhan orang dalam organisasi, kelompok maupun tim.

Banyak faktor yang mempengaruhi hakikat dan luasnya jaringan komunikasi, diantaranya hubungan dalam organisasi, arah dari arus pesan, hakikat seri dari arus pesan, dan isi dari pesan. Beberapa jaringan

ditentukan oleh mekanisme yang sangat formal seperti jaringan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Sementara ada juga jaringan komunikasi yang timbul tanpa perhatian dan perencanaan lebih dahulu seperti jaringan komunikasi informal.

Jaringan komunikasi ini dapat dibedakan atas jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Komunikasi formal ini mencakup susunan tingkah laku organisasi, pembagian departemen maupun tanggungjawab tertentu, posisi jabatan dan distribusi pekerjaan yang ditetapkan bagi anggota organisasi yang berbeda. Sedangkan jaringan komunikasi informal tidaklah direncanakan dan biasanya tidaklah mengikuti struktur formal organisasi, tetapi timbul dari interaksi sosial yang wajar diantara anggota organisasi.

Jaringan komunikasi formal, pesan telah mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. Pesan (*message*) mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal. Arni Muhammad (2001:107), mengemukakan bahwa arus pesan dalam jaringan komunikasi formal meliputi, yaitu:

- 1) *Downward Communication* atau komunikasi kepada bawahan.
- 2) *Upward Communication* atau komunikasi kepada atasan.

3) *Horizontal Communication* atau komunikasi horisontal.

Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan (tingkat yang lebih tinggi) kepada bawahannya (tingkat yang lebih rendah). Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijakan-kebijakan umum. Menurut Lewis (1987) komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.

Sedangkan komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Semua anggota dalam suatu organisasi kecuali yang berada pada tingkatan yang paling atas mungkin berkomunikasi ke atas. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran dan mengajukan pertanyaan. Menurut Smith (Goldhaber, 1986) dikatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada anggota untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi institusinya. Sementara menurut Arni Muhammad

(2001:117), fungsi komunikasi ke atas adalah (a) atasan dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dari mereka dan bagaimana baiknya mereka menerima apa yang disampaikan anggota (b) memberikan informasi yang berharga bagi pembuatan keputusan (c) memperkuat prestasi dan loyalitas anggota terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan, mengajukan ide-ide dan saran-saran (d) mendorong desas-desus yang muncul dan membiarkan atasan dapat menentukan apakah bawahan menangkap arti seperti yang ke bawah (f) membantu anggota mengatasi masalah-masalah pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dalam tugas-tugasnya dan organisasi.

Komunikasi horisontal yaitu pertukaran pesan diantara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horisontal. Pesan ini biasanya berhubungan dengan koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi. Menurut Arni Muhammad (2001:122), tujuan komunikasi horisontal adalah (a) mengkoordinasikan tugas-tugas (b) saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas (c) memecahkan masalah-masalah yang timbul diantara orang-orang yang berada dalam tingkatan yang sama (d) menyelesaikan konflik diantara anggota yang ada dalam organisasi (e) menjamin pemahaman yang sama.

Proses komunikasi dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini adalah proses komunikasi dengan model dua arah yang sejalan dengan proses jaringan komunikasi seperti yang terurai di atas.

Dengan demikian komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah), dari bawahan (tingkat yang lebih rendah) kepada atasan (tingkat yang lebih tinggi), dan individu yang satu ke individu lain yang sama tingkat otoritasnya melalui media komunikasi tertentu.

b. Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi pelaksana sangat diperlukan dalam rangka mengolah dan melaksanakan program-program pembangunan termasuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Apa yang dimaksud dengan kemampuan organisasi, maka perlu mempelajari dan mendalami makna kemampuan dan makna organisasi itu sendiri..

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa organisasi adalah "setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan" (dalam Indrawijaya, 1989:3).

Selanjutnya Atmosudirdjo mengatakan bahwa organisasi adalah "struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara

sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu" (dalam ibid:4). Sementara menurut pandangan Indrawijaya (1986:4) dikatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama

Jadi dengan demikian bahwa setiap organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama tadi dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Dalam banyak hal orang yang bertanggung jawab tadi juga harus mengkoordinasikan aneka ragam kegiatan sekumpulan orang yang lazimnya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ketentuan-ketentuan yang seharusnya disiplin bersama sering tidak diketahui oleh semuanya dan malah mungkin terpaksa disetujui. Organisasi menjadi sangat kompleks, strukturnya menjadi rumit, dan tingkat formalitas menjadi makin besar. Semua itu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi setiap orang yang bekerja sama dalam organisasi.

Sedangkan makna kemampuan menurut Stephen P. Robbins (1996:82) adalah "kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan". Dengan demikian maka makna dari kemampuan organisasi adalah kapasitas suatu organisasi untuk mengerjakan berbagai tugas

dalam suatu pekerjaan. Kapasitas atau kemampuan organisasi sangat berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam organisasi itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pandangan Josep W. Eaton yang mengemukakan bahwa sumber daya adalah merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya merupakan sumber energi. Sumber daya merupakan masukan-masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa untuk menambah kemampuan organisasi itu sendiri. (1986:25). Dengan demikian maka sumber daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi. Dan kemampuan organisasi adalah sebagai modal sarana untuk menjalankan roda keorganisasian.

Lebih lanjut Eaton (1986:136) mengemukakan bahwa adanya kelangkaan sumber daya, maka perlu adanya suatu prioritas dalam mengalokasikan sumber daya tersebut demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mencapai perubahan-perubahan dalam nilai dan struktur di dalam atau diluar dirinya melalui pengalokasian yang strategis dan taktis.
- 2) Menerapkan, memelihara dan melindungi pola-pola hubungan dan tindakan normatif melalui kepemimpinan dan penggunaan doktrin dengan alokasi strategis dan taktis.
- 3) Memperoleh dukungan dan arus sumber-sumber daya dari organisasi dan sektor-sektor dalam lingkungannya.

Sementara menurut Milton J. Esmen (1983:33) sumber daya diklasifikasikan menjadi enam kategori, yaitu Staf, wewenang, dana, peralatan, fasilitas dan Informasi. Staf adalah pegawai yang akan melaksanakan wewenang, megolah dana yang ada, mengopersonalkan peralatan dan fasilitas

serta memanfaatkan informasi yang ada. Wewenang mutlak dimiliki untuk keabsahan beroperasinya organisasi. Dana diperlukan untuk membiayai fasilitas dan peralatan serta untuk menggaji pegawai dan operasional organisasi lainnya. Peralatan dan fasilitas diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pelaksanaan suatu program pembangunan.

Sejalan dengan pendapatnya Esman, Dave Ulrich (2001:226) mengemukakan bahwa kemampuan mencerminkan keterampilan, kecakapan dan pengalaman di dalam organisasi. Kemampuan tersebut menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dan bagaimana mereka melaksanakannya, dan kemampuan tersebut adalah kumpulan dari kemampuan-kemampuan individual yang diubah menjadi kemampuan organisasi.

Sedangkan menurut Gary Hamel dan C.K Prahalad, dalam *Competing for the future* menyebutkan kemampuan "sebagai keahlian inti, dengan memusatkan perhatian pada keahlian teknologi yang berada dalam perusahaan tersebut" (dalam ibid:226).

Dan menurut pandangan John W. Neuner, bahwa kemampuan organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya organisasi yaitu *men* (orang), *Materials* (bahan/peralatan), *mechines* (mesin-mesin), *methods* (metode-metode), *money* (uang) dan *Morale* (Moral) (dalam Silalahi, 1999:156).

Dengan memahami teori-teori tersebut diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan organisasi (pelaksana program pembangunan)

antara lain adalah staf, wewenang, dana, peralatan, fasilitas, informasi, metode-metode, moral, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman.

Dengan demikian penulis dalam merumuskan definisi Kemampuan Organisasi akan mengadopsi dari teori-teori tersebut. Jadi Kemampuan Organisasi adalah kapasitas organisasi yang meliputi staf, wewenang, dana, fasilitas, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk mengerjakan tugas dalam pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan suatu kebijakan program pembangunan.

Mengenai faktor-faktor tersebut diatas akan diuraikan lebih jelas adalah sebagai berikut :

1) Staf/pegawai

Staf adalah orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan, termasuk yang memdayagunakan sumber daya yang ada. Staf atau pegawai merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kelangsungan atau proses dan aktivitas administrasi hingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Staf juga merupakan penggerak utama atau inovator untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi yaitu merencanakan tujuan, pelaksanaan hingga tercapainya tujuan yang direncanakan. (dalam Silalahi, 1999:15) Dengan demikian jumlah pegawai atau staf sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu program pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Wewenang

Seseorang yang disertai tugas untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya berarti orang tersebut telah diberi wewenang. Pertanggung jawaban itu hanya dapat dipenuhi sebaik-baiknya bila kepadanya didelegasikan kekuasaan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsinya.

Dalam proses pendelegasian wewenang ada 3 unsur penting yaitu *responsibility* (tugas), *Outhority* (kekuasaan), dan *Accountability* (pertanggung Jawaban) (manulang, 1982:111). Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah *pertama*, pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) mendelegasikan wewenang yaitu memberi tugas dan kekuasaan kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah). Tugas merupakan peluang-peluang yang harus dilakukan oleh seseorang pada sesuatu jabatan tertentu, sedang kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi. *Kedua*, Bawahan (tingkat yang lebih rendah) yang menerima tugas dan kekuasaan dari pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) tersebut melaksanakan tugas tersebut dengan mempergunakan kekuasaan yang diterimanya. *Ketiga*, Bawahan (tingkat yang lebih rendah) memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan (tingkat yang lebih tinggi). Memberikan pertanggungjawaban berarti memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana seseorang tersebut memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi pertanggungjawaban adalah

pemberian laporan kepada bagaimana tugas-tugas dilaksanakan dan cara bagaimana kekuasaan dipakai.

Dengan demikian pendelegasian wewenang akan dapat memberikan peningkatan tanggung jawab, menambah kemampuan pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi diantara berbagai kegiatan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah salah satu kebijakan Pemerintah. Dan Pemerintah mendelegasikan wewenangnya kepada para pelaksana program, baik pada level atas ataupun pada level bawah.

3) Dana.

Dana diperlukan untuk membiayai operasional organisasi atau program pembangunan. Yaitu untuk membayar gaji pegawai atau petugas lapangan, insentif pegawai/petugas lapangan, biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Sumber dana untuk membiayai program harus jelas dan dipergunakan atau dikeluarkan dengan jelas pula demi transparansi dan pertanggungjawaban. Dengan demikian besar kecilnya dana yang ada akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu program itu berjalan. Dana yang cukup memungkinkan pelaksanaan program akan berjalan lancar dan sebaliknya dana yang kurang memungkinkan pelaksanaan program tidak berjalan lancar dan akan menyebabkan tidak atau kurang tercapainya tujuan program.

4) Fasilitas

Fasilitas adalah perlengkapan fisik yang dimanfaatkan untuk mempermudah dan memperlancar implementasi kebijakan atau pelaksanaan program. Menurut Purnaweni (1991:26) dikemukakan bahwa fasilitas fisik dalam implementasi kebijakan merupakan sumber daya yang penting bagi implementasi kebijakan karena tanpa adanya perlengkapan fisik seperti bangunan, alat-alat maupun perlengkapan penyokong lainnya, implementasi mungkin tidak akan berhasil. Disamping kecukupan fasilitas yang diperlukan, memilih ketepatan penggunaan fasilitas merupakan hal penting untuk lebih memperlancar pelaksanaan program.

5) Keterampilan

Dalam rangka mengimplementasikan program kebijakan, maka para administrator atau para pelaksana harus memiliki keterampilan yang memadai. Robert L. Katz, sebagaimana dikutip oleh James A.F Stoner (1986), menentukan tiga jenis dasar ketrampilan, yaitu Keterampilan Teknis (*Technical Skill*), Keterampilan Manusiawi (*Human Skill*) dan Keterampilan Konsep (*Conceptual Skill*) (dalam Silalahi, 1999:145).

Keterampilan Teknik yaitu keterampilan yang berhubungan erat dengan penggunaan alat-alat, prosedur-prosedur, metode-metode dan teknik-teknik dalam suatu aktivitas manajemen dengan benar dan tepat. Misalnya kursus keuangan, akuntansi, komputer dan lain-lain.

Keterampilan Hubungan manusia adalah kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik, memahami dan mendorong orang lain, baik secara individual maupun kelompok sehingga mereka bekerja lebih produktif dengan orang lain.

Ketrampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Atau kemampuan untuk melihat masalah-masalah individual dan masalah-masalah organisasional dalam bagian-bagiannya dalam hubungannya dengan gambaran keseluruhannya sebagai kesatuan yang kait mengkait, bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain.

6) Kecakapan

Kecakapan diartikan pula kepandaian seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan berarti cakap dalam memberikan masukan-masukan demi kelancaran dalam pelaksanaan program, cakap dalam mengantisipasi munculnya masalah-masalah, cakap dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah salah satu kebijakan Pemerintah yang dalam mengimplementasikannya perlu kecakapan bagi para administrator dan para pelaksana program. Para pelaksana sebaiknya mampu memberikan masukan-masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mampu mengantisipasi munculnya masalah-masalah dan juga sebaiknya mampu memecahkan

masalah atau mencari jalan keluar demi keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7) Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang diperoleh seseorang karena melaksanakan pekerjaan tertentu dimasa lalu. Melaksanakan pekerjaan yang berbrda-beda akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda pula. Pengalaman akan bertambah jika melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Disamping itu tingkat keseringan melaksanakan pekerjaan yang sama juga akan menambah pengalaman.

Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini para administrator atau para pelaksana program perlu memiliki pengalaman dalam mengelola program yang sama atau sejenis. Jika para pelaksana ini memiliki pengalaman dalam mengelola program pembangunan yang sama, maka akan didapatkan kemudahan-kemudahan dan kecepatan-kecepatan dalam menangani program tersebut. Jika belum mempunyai pengalaman memungkinkan ditemukannya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dan ini berdampak pada kurang bahkan tidak berhasilnya implementasi program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengawasan

Untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi atau program pembangunan termasuk dalam hal ini adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), maka fungsi pengawasan sangat

diperlukan. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang pengawasan, maka perlu mengerti dan memahami makna dari pengawasan itu sendiri. Riatmojo (2000:5) mengatakan pengawasan adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan atau terjadi. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1986:98) mengemukakan :

“Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha untuk menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam suatu wadah yang telah disusun”

Pada dasarnya ada 5 (lima) prinsip dari pengawasan menurut Sudibyo (2000:7), yaitu :

1. Obyektif dan menghasilkan fakta.
Pengawasan harus bersifat obyektif dan dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku.
Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang tercantum dalam :
 - Tujuan dan sasaran yang ditetapkan
 - Rencana kerja yang telah ditetapkan
 - Pedoman kerja yang digariskan
 - Perkiraan-perkiraan yang ditetapkan
3. Preventif.

Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu pengawasan harus sudah dilakukan pada tahap perencanaan dengan menilai rencana yang akan dilaksanakan.

4. Pengawasan bukan tujuan.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Efisiensi.

Pengawasan harus dilakukan secara efisien bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi atau program-program pembangunan menurut Gie (1979:121-122) perlu ditempuh langkah-langkah antara lain, yaitu :

1. Menentukan ukuran atau pedoman laku.
2. Penilaian atau pengukuran pekerjaan yang bersangkutan
3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan.
4. Pembetulan terhadap penyimpangan, sehingga pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Winardi (1986) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang dibentuk melalui 3 macam langkah yang bersifat universal, yaitu :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan yang dicapai dengan standart dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan.
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Sementara Swastha (1984:216) cenderung mengatakan bahwa proses dasar pengawasan dapat diuraikan dalam tiga tahapan yaitu :

1. Menentukan standart pekerjaan yang harus dicapai
2. Mengukur kerja dengan standart kerja yang ada
3. Membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari standart dan rencana.

Supaya pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. Menurut Sarwoto (1988:99) yang mengutip pendapatnya William H. Newman mengatakan bahwa sistem pengawasan yang baik memerlukan beberapa syarat, antara lain :

- a. Harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- b. Harus menjamin adanya tindak perbaikan.
- c. Harus luwes
- d. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam mana pengawasan itu akan dilakukan.
- e. Harus ekonomis dalam hubungannya dengan biaya.
- f. Harus memperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai, yaitu harus ada rencana yang jelas, pola tata organisasi yang jelas.

Sedangkan menurut Sarwoto (1988:100) bahwa pengawasan yang baik harus memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan

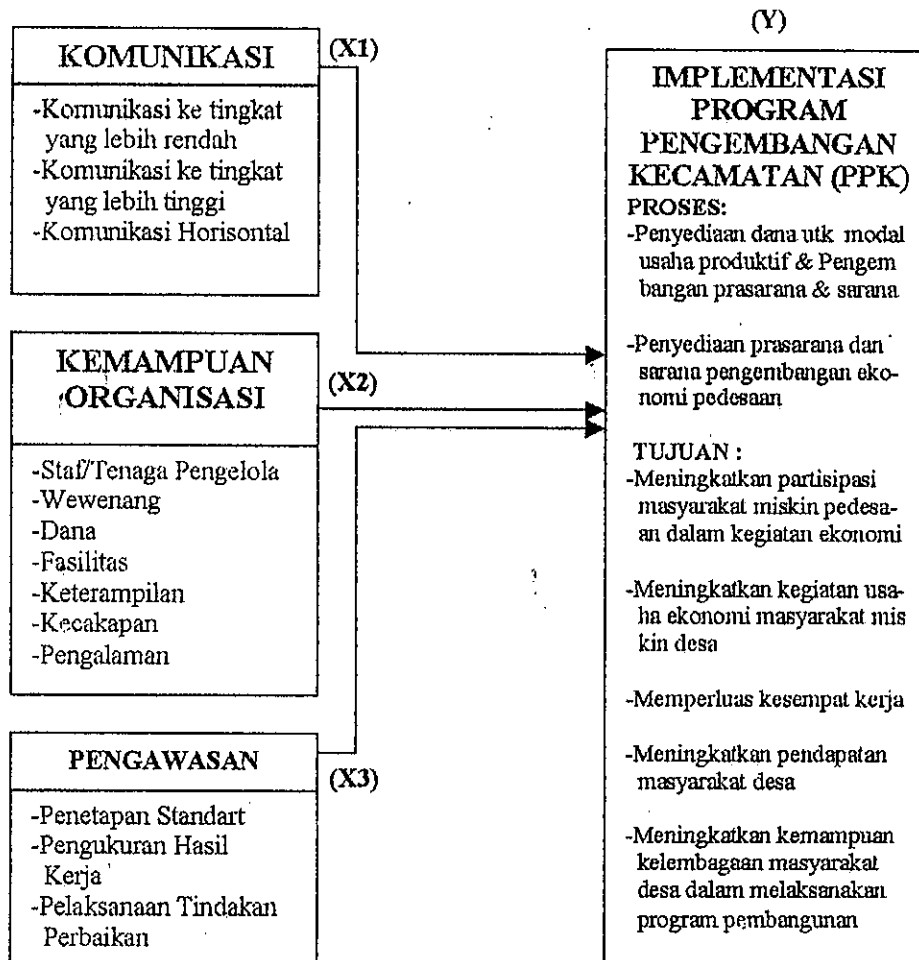
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang bersalah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul
7. Pengawasan harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya.

Pengawasan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tidak hanya dilakukan oleh mereka yang ada pada tingkat yang lebih tinggi tetapi juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keberhasilan PPK di desa yang bersangkutan.

Dengan demikian pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) untuk mengamati dan menilai bawahan (tingkat yang lebih rendah) terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dimulai dari penentuan standart, pengukuran hasil kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan atau korektif bila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi kesalahan dan penyimpangan yang kesemuanya ini diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan program pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi PPK seperti gambar berikut:

Gambar : 6

**Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**



4 Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Menurut Brent D. Ruben (1988) bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud informasi adalah kumpulan data atau pesan. Menciptakan informasi yang dimaksudkan adalah tindakan penyandian pesan. Mengirimkan informasi maksudnya adalah proses dengan mana pesan dipindahkan dari si pengirim kepada orang lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksudkan menggunakan informasi menunjuk kepada peranan informasi dalam mempengaruhi tingkah laku manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi komunikasi adalah mempengaruhi orang lain.

Implementasi diartikan juga sebagai pelaksanaan. Apabila dikaitkan dengan komunikasi maka setiap pelaksanaan suatu apapun sangat diperlukan adanya komunikasi dalam rangka mempengaruhi orang-orang untuk melaksanakan sesuatu tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edmards III bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi adalah komunikasi. Jika proses komunikasi itu dapat berjalan dengan baik maka kemungkinan besar proses implementasi

kebijakan itu akan berjalan baik pula dan sebaliknya bila proses komunikasinya kurang bahkan tidak berjalan dengan baik dipastikan proses implementasi suatu kebijakan itu akan berantakan.

Dikaitkan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK), maka komunikasi sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam rangka :

- a. Komunikasi ke bawah yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Komunikasi dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, dari tingkat Kecamatan ke tingkat Desa dan dari tingkat Desa ke masyarakat. Biasanya berkenaan dengan sosialisasi program, pengarahan dan kebijakan-kebijakan umum berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- b. Komunikasi ke atas adalah untuk menyampaikan pesan-pesan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi dari tingkat masyarakat ke tingkat Desa, dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan, dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten. Biasanya berkenaan dengan saran-saran dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- c. Komunikasi Horisontal yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan diantara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya dalam suatu organisasi. Komunikasi antar anggota masyarakat, antar para pelaksana, antar desa dan antar Kecamatan maupun komunikasi antara para penerima bantuan program. Hal ini berkenaan dengan koordinasi, pemecahan masalah,

penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi dalam rangka kelancaran implementasi program Pengembangan Kecamatan (PPK).

5 Hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Kemampuan organisasi merupakan kapasitas organisasi untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang diemban oleh organisasi tersebut.

Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sangat membutuhkan kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola program tersebut. Kemampuan organisasi tersebut meliputi staf/pegawai, wewenang, dana, fasilitas, keterampilan, kecakapan dan pengalaman. Unsur-unsur sumber daya tersebut dimaksudkan untuk memperlancar dalam proses implementasi program.

Dengan demikian organisasi pelaksana dengan kemampuan yang cukup akan dapat mengimplementasikan Program Pengembangan Kecamatan dengan baik yaitu sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya jika organisasi pelaksana ini tidak memiliki kemampuan yang cukup maka akan menghambat pelaksanaan program tersebut dan ini akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan program tersebut.

6. Hubungan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi atau tujuan suatu program pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (1983:38) yaitu :

Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

1. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
3. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi pengawasan tersebut, maka pihak pelaksana atau pengelola program dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dengan sungguh-sungguh dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai standat dan prosedur yang ada serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dengan demikian fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan harapan apabila terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan PPK akan segera dilakukan tindakan korektif atau perbaikan sehingga kesalahannya tidak

menjadi membesar atau fatal, sehingga pencapaian tujuan organisasi atau program pembangunan tersebut dapat terwujud dengan baik.

7. Hubungan Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan dengan Implementasi PPK.

Model Implementasi Edward III tersirat bahwa keberhasilan implementasi suatu program pembangunan sangat tergantung pada faktor-faktor internal, yaitu manajemen program. Faktor internal tersebut adalah komunikasi, Sumber Daya yang dekat pada kemampuan organisasi, struktur organisasi dan sikap. Disamping faktor-faktor tersebut ada faktor internal lain yang tidak masuk pada model Edward III, yaitu pengawasan. Dengan demikian faktor-faktor internal yang dipandang sangat berpengaruh terhadap implementasi PPK adalah komunikasi, kemampuan organisasi, dan pengawasan.

Komunikasi diperlukan dalam rangkaian komunikasi ke bawah, yaitu sosialisasi program, pengarahan dan pendelegasian; komunikasi ke atas, yaitu penyampaian saran-saran dan masukan serta komunikasi horisontal untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pemecahan masalah dan pemecahan konflik.

Kemampuan organisasi diperlukan dalam rangka mengelola program. Kemampuan organisasi dapat dilihat dari jumlah pengelola yang ada, wewenang, dana, fasilitas, keterampilan, kecakapan dan pengalaman yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri.

Pengawasan diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program, yaitu melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan serta memperbaiki kesalahan, penyimpangan tersebut agar tujuan tercapai.

Kaitannya dengan implementasi PPK, maka komunikasi yang baik, kemampuan organisasi yang baik dan pengawasan yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya dan sebaliknya. Karena masalah-masalah yang ada di Kecamatan Wedung adalah masalah-masalah internal, bukan masalah kepentingan-kepentingan politik, sehingga hal ini lebih mudah diatasi, jika ada komitmen terhadap manajemen.

B. Pembahasan Penelitian yang relevan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan program-program pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Pasca proyek Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Nelayan (P3EMDN) Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kelautan UNDIP Semarang dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Dalam implementasi permasalahan yang dihadapi berupa administrasi keuangan, kesiapan aparat dalam hal manajemen proyek, kesiapan masyarakat menerima konsep pengembangan masyarakat.
 - b. Manfaat Program P3EMDN

- 1) Ketersediaan prasarana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan usaha produktif, dan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Pemberian modal usaha untuk usaha produktif dapat meningkatkan produktivitas, omset, dan pendapatan masyarakat sasaran.
 - 3) Manfaat untuk pengembangan kegiatan berorganisasi kelompok usaha belum signifikan, walaupun indikasi adanya perubahan kearah perbaikan sudah ada.
 - 4) Manfaat untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat belum nyata.
 - 5) Dampak yang teridentifikasi dari program P3EMDN adalah adanya kecemburuan masyarakat desa nelayan penerima program dengan desa non penerima program.
2. Evaluasi Pasca Program P3DT Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 dan 2000 oleh Bappeda Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :
- a. Program P3DT Tahun Anggaran 1999/2000 dan 2000 telah dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 17,48 km yang dapat meningkatkan akses pemasaran dan membuka isolasi daerah; pembangunan pasar desa seluas 23.169 meter persegi untuk menunjang terciptanya akses pemasaran komoditi lokal dan komoditi yang diperlukan masyarakat; Pembangunan 1.425 MCK dan 3,633 unti

prasarana air bersih; dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sebanyak 1.304.663 orang yang terdiri dari perempuan 13,16%, pemuda 17,96% dan penduduk miskin 68,88%; telah dibangun prasarana irigasi sebanyak 131 unit bendung, 163.077 m² saluran irigasi dan 379 unit bangunan irigasi.

- b. Program P3DT dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, teknis pelaksanaan, administrasi dan manajemen program.
 - c. Program P3DT dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang otomatis dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan.
 - d. Manfaat program P3DT dirasakan sangat berarti bagi masyarakat, karena dapat terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, meningkatkan ketrampilan, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan kelembagaan, akan tetapi kurang berarti untuk peningkatan pendapatan atau pemupukan modal masyarakat.
 - e. Pelestarian program telah dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, baik dalam tenaga dan penyandang dana.
3. Penelitian pelaksanaan IDT di tiga desa yaitu Desa Sendang, Terjan, dan Tanjungsari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, oleh Apun Rudi Legowo, 1995 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Program Aneka Usaha Tani Terpadu berhasil pada ketiga desa tersebut yaitu Desa Sendang, Terjan dan Tanjungsari.
- b. Program Intensifikasi hanya dapat berhasil baik pada desa Terjan dan Sendang.
- c. Program Gaduhan hanya berhasil baik di Desa Tanjungsari.

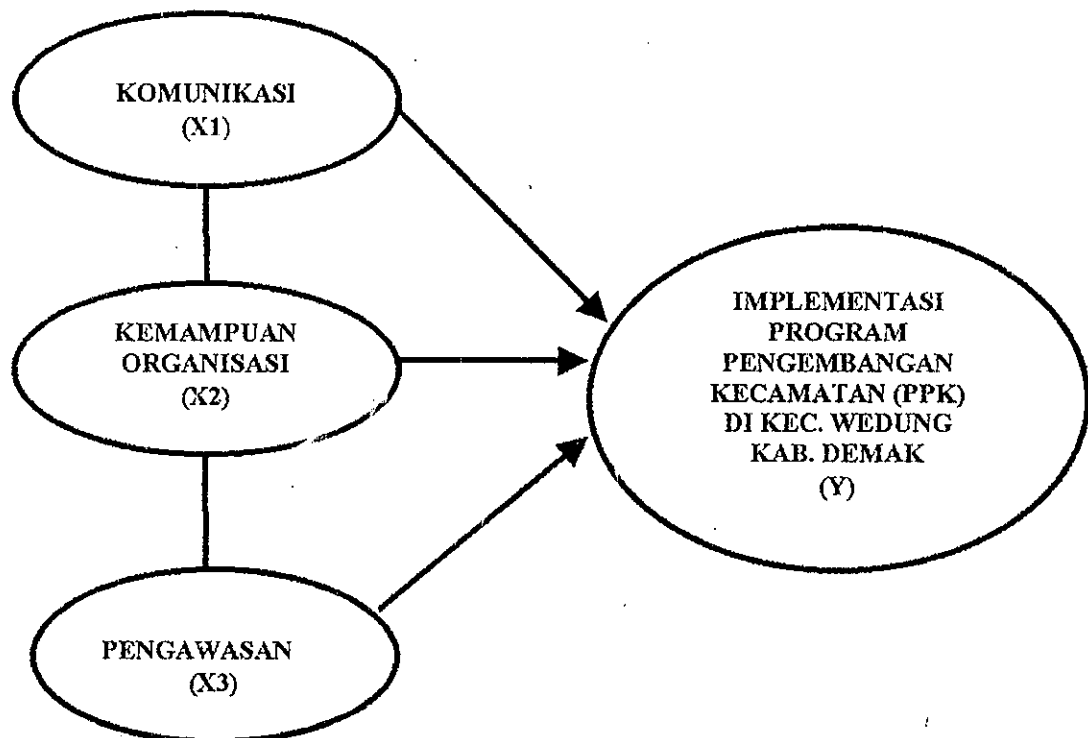
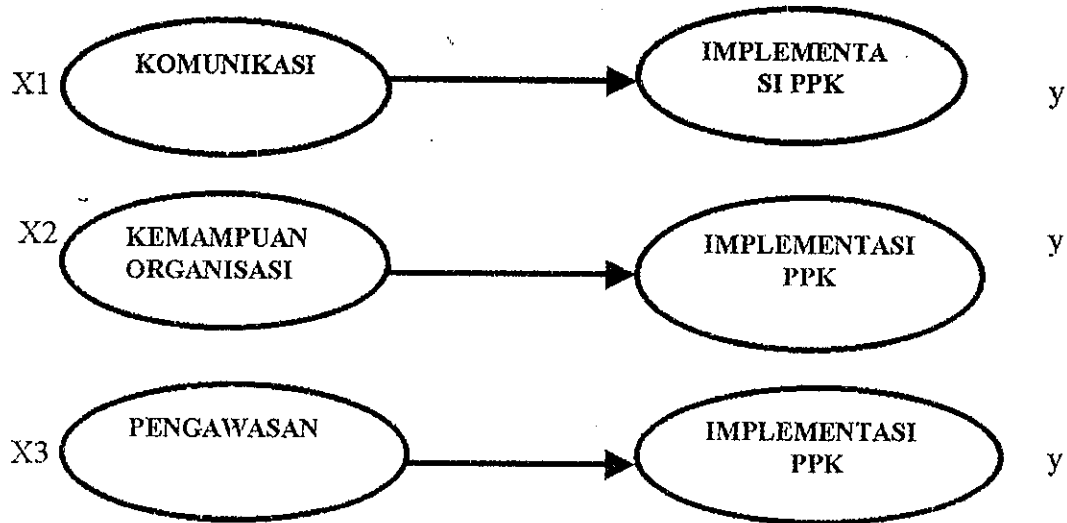
C. Hipotesis

1. Ada hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Ada hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Ada hubungan antara pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
4. Ada hubungan antara Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Hipotesis tersebut dapat digambarkan melalui skema dibawah ini :

Gambar : 7

GEOMETRIK HIPOTESIS



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian *explanatory* yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat berbagai variabel yang diteliti (Koentjoroningrat, 1990:42).

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Pengawasan dikaitkan dengan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak yang memperoleh bantuan dana dari Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Yaitu Kecamatan yang pada tahun pertama (1998/1999) dan Tahun kedua (1999/2000) paling besar mengalami tunggakan angsuran untuk modal usaha produktif dan juga paling banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu Kecamatan Wedung. Penelitian ini

akan dilakukan di desa-desa di Kecamatan Wedung yang memperoleh bantuan dana PPK yaitu :

- a. Tahun Pertama (1998/1999) yaitu Desa Ruwit, Berahan Wetan dan Mutih Wetan.
- b. Tahun Kedua (1999/2000) yaitu Desa Bungo, Kenduren, Jungpasir, Jungsemi, Mutih Kulon, Jetak, Berahan Kulon, dan Tedunan.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

Dalam penelitian ini digunakan empat variabel yang diklasifikasikan sebagai variabel bebas berjumlah tiga variabel dan variabel terikat satu buah. Variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai variabel terikat.
- b. Variabel Komunikasi sebagai variabel bebas kesatu (X1).
- c. Variabel Kemampuan Organisasi sebagai variabel bebas kedua (X2).
- d. Variabel Pengawasan sebagai variabel ketiga (X3).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual pada dasarnya hanya untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian, agar tidak menimbulkan keaburan atau kesalahpahaman makna. Menurut Robert Mayor dan Ernes Geent Wood bahwa konsep adalah orientasi pengertian terhadap studi dengan harapan bahwa

kerangka konseptual ini dapat memberikan kerangka supertif bagi model tersebut berdasarkan model empiris yang diperoleh dari riset terdahulu atau ditambahkan asumsi-asumsi nilai yang berasal dari pemecahan yang diusulkan.

Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang digunakan oleh peneliti, maka akan dikemukakan definisi konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu variabel Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan adalah sebagai berikut :

a) Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan/program itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan/program yang telah ditetapkan.

b) Komunikasi

Adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah), dari bawahan (tingkat yang lebih rendah) kepada atasan (tingkat yang lebih tinggi), dari individu yang satu ke individu lain yang sama tingkat otoritasnya melalui media komunikasi tertentu.

c) Kemampuan Organisasi

Adalah kapasitas organisasi yang meliputi staf/pegawai, wewenang, dana, fasilitas, ketrampilan, kecakapan dan pengalaman untuk mengerjakan tugas

dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan suatu kebijakan program.

d) Pengawasan

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) untuk mengamati dan menilai bawahan (tingkat yang lebih rendah) terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dimulai dari penentuan standart, pengukuran hasil kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan atau korektif bila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kesalahan dan penyimpangan yang kesemuanya ini diarahkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau suatu program pembangunan.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan suatu batasan mengenai suatu variabel yang diukur dengan berdasarkan apa yang didapat pada definisi konseptual. Menurut Tatag M. Arifin, yang dimaksud dengan definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan indikator-indikator suatu gejala dalam pengujian. Indikator-indikator dalam penelitian ini adalah seperti dalam matrik sebagai berikut:

MATRIK VARIABEL
ANALISIS FAKOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN WEDUNCI
KABUPATEN DEMAK

No	Variabel	Indikator	Nomor Pertanyaan
1	Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK): Serangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan / program itu diputuskan yaitu melalui langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan / program yang telah ditetapkan.	<p>1. Proses:</p> <p>a. Penyediaan dana untuk kegiatan usaha produktif dan pengembangan prasarana dan sarana -Tingkat kesesuaian penggunaan dana PPK -Tingkat Kecukupan dana untuk kegiatan PPK</p> <p>b. Penyediaan prasarana dan sarana untuk pengembangan ekonomi pedesaan -Tingkat kesesuaian pembangunan / pengembangan prasarana desa -Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana desa</p> <p>2. Tujuan</p> <p>a. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pedesaan dalam kegiatan ekonomi -Tingkat partisipasi masyarakat dalam merencanakan kebutuhan desa -Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian PPK</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin desa -Tingkat perkembangan kegiatan ekonomi desa</p> <p>c. Memperluas kesempatan kerja -Tingkat kemudahan dalam mendapatkan lapangan kerja</p> <p>d. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa -Tingkat pendapatan masyarakat desa</p> <p>e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa dalam melaksanakan program pembangunan -Tingkat kemampuan lembaga desa dalam melaksanakan program pembangunan</p>	<p>1,2,3</p> <p>4,5</p> <p>6,7,</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p>
2	Komunikasi : Suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pimpinan	<p>1. Downward Communication atau komunikasi kepada tingkat yang lebih rendah -Frekuensi sosialisasi PPK ke desa-desa</p>	<p>12,13,14,15, 16,</p>

	<p>(tingkat yang lebih tinggi) kepada bawahan (tingkat yang lebih rendah), dari bawahan (tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi), dan individu yang satu ke yang lain yang sama tingkat otoritasnya melalui media komunikasi tertentu.</p>	<p>-Tingkat kejelasan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi program -Tingkat ketepatan penggunaan media komunikasi</p> <p>2. Upward Communication atau komunikasi kepada tingkat yang lebih tinggi -Tingkat keseringan dalam memberikan ide-ide, saran dan masukan -Tingkat ketepatan penggunaan media komunikasi</p> <p>3. Horizontal Communicatio atau komunikasi horisontal/tingkat yang sama -Tingkat keseringan berkomunikasi dengan para pelaksana PPK di desa -Tingkat keseringan berkomunikasi dengan para pelaksana PPK antar desa</p>	<p>17,18,19,20, 21.</p> <p>22,23,24,25,</p>
3	<p>Kemampuan Organisasi: Kapasitas organisasi yang meliputi staf / pegawai, wewenang, dana, fasilitas, keterampilan, kecakapan, dan pengalaman untuk mengerjakan tugas dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kebijakan program.</p>	<p>1. Staf/tenaga pelaksana -Tingkat kecukupan jumlah aparat pengelola PPK</p> <p>2. Wewenang -Tingkat keseringan mendelegasikan wewenang kepada bawahan / para pelaksana di lapangan (desa)</p> <p>3. Dana -Tingkat kecukupan dana untuk insentif para pengelola PPK</p> <p>4. Fasilitas -Tingkat kecukupan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan PPK</p> <p>5. Keterampilan -Tingkat keterampilan melalui pelatihan sebefore melaksanakan PPK -Tingkat keterampilan mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam melaksanakan PPK</p> <p>6. Kecakapan -Tingkat antisipasi munculnya masalah -Tingkat kecepatan dalam mengatasi masalah yang muncul</p> <p>7. Pengalaman -Tingkat kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan yang sejenis</p>	<p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30,31,</p> <p>32,33,</p> <p>34</p>
4	<p>Pengawasan : Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan (tingkat yang lebih tinggi) untuk mengamati dan menilai bawahan (tingkat yang lebih rendah) terhadap pelaksanaan tugas dan</p>	<p>1. Penetapan standart -Tingkat kecukupan peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPK -Tingkat kejelasan taia aturan dalam pelaksanaan PPK -Tingkat kesesuaian kondisi riil masyarakat dengan standart yang telah ditetapkan</p> <p>2. Pengukuran hasil kerja</p>	<p>35,36,37,</p> <p>38,39,40,</p>

<p>pekerjaan yang dimulai dari penentuan standart, pengukuran hasil kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan atau korektif bila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kesalahan dan penyimpangan yang kesemuanya ini diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau program pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana -Tingkat kesesuaian antara rencana dengan standart yang telah ditetapkan -Tingkat kesesuaian antara hasil kerja dengan standart kerja yang ada -Tingkat pengawasan preventif terhadap pelaksanaan PPK <p>3. Pelaksanaan tindakan perbaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat intensitas pemberian tegoran kepada yang menyimpang -Tingkat intensitas dalam melakukan tindakan perbaikan -Tingkat Penerapan sanksi. 	<p>41,42,43</p>
---	---	-----------------

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai bahan pengolahan penelitian, yakni :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pelaksana PPK di desa-desa yang memperoleh dana PPK tersebut. Yaitu Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Fasilitator Desa, Tenaga Teknis Desa untuk kegiatan usaha produktif dan Tenaga Teknis Desa untuk kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana/sarana desa melalui pengisian kuesioner, sedangkan terhadap masyarakat penerima manfaat bantuan dana PPK adalah melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu berupa dokumen-dokumen PPK, laporan perkembangan PPK dari konsultan PPK baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Demak dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten demak.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berstruktur dan wawancara. Untuk kuesioner telah disediakan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden secara bebas yaitu berupa :

- a. Daftar Pertanyaan tentang Implementasi Program Pengembangan Kecamatan.
- b. Daftar pertanyaan tentang Komunikasi.
- c. Daftar pertanyaan tentang Kemampuan Organisasi.
- d. Daftar pertanyaan tentang Pengawasan.

Disamping questioner tersebut, disiapkan pula pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara kepada Masyarakat penerima manfaat bantuan dana PPK.

6. Populasi dan Teknik Pengambilan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1998: 57).

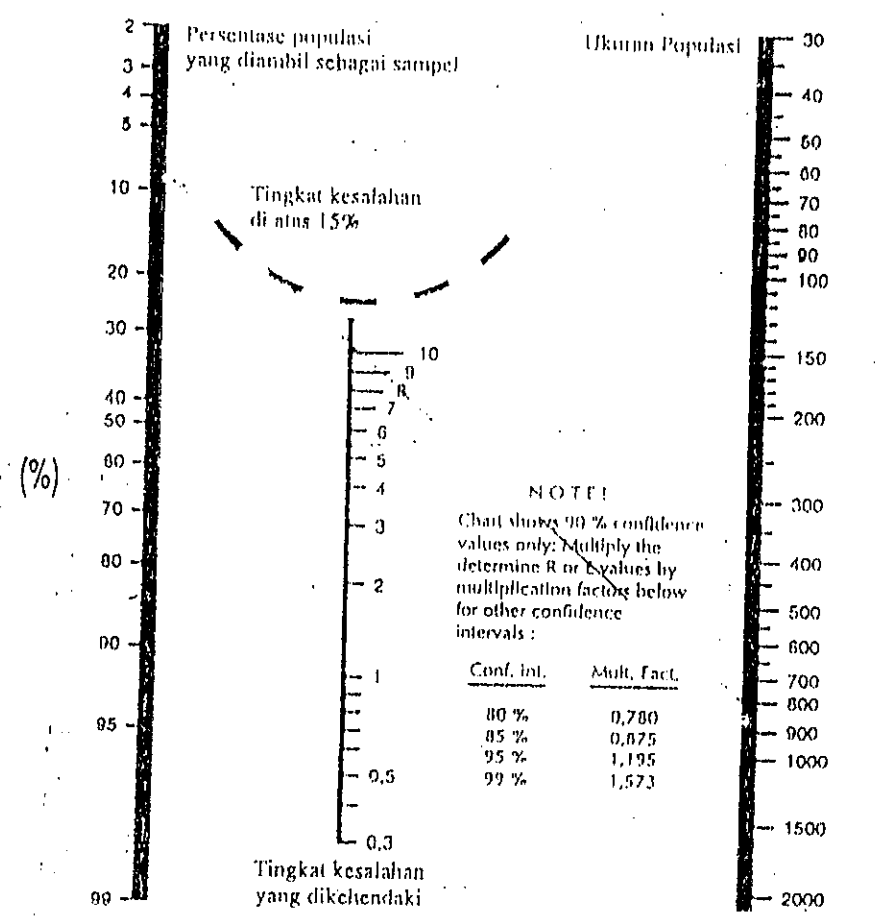
Sedangkan sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Ibid: 57).

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat pelaksana PPK di 11 desa yang memperoleh dana PPK pada tahun I (1998/1999) dan tahun II (1999/2000) sebanyak 66 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Nama Desa	Kepala Desa	Kotua LKMD	Ketua BPD	Fasilitator desa	Tonaga Teknis Ds (Ush produk Tif)	Tonaga Teknis Ds (pengembangan prasarana/sarana)	Jml
1	98/99	1. Ruwit	1	1	1	1	1	1	6
		2. Berahan Wetan	1	1	1	1	1	1	6
		3. Mutih Wetan	1	1	1	1	1	1	6
2	99/00	4. Bungo	1	1	1	1	1	1	6
		5. Kenduren	1	1	1	1	1	1	6
		6. Jungpasir	1	1	1	1	1	1	6
		7. Jungsemi	1	1	1	1	1	1	6
		8. Mutih Kulon	1	1	1	1	1	1	6
		9. Jetak	1	1	1	1	1	1	6
		10. Berahan Kulon	1	1	1	1	1	1	6
		11. Tedunan	1	1	1	1	1	1	6
		Jumlah	11	11	11	11	11	11	66

Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini digunakan *Nomogram Harry King* (Ibid:66) dengan tingkat kepercayaan sampel terhadap populasi 90% atau tingkat kesalahan 10%. Ini dilakukan dengan cara menarik garis dari angka 66 (jumlah populasi) melewati taraf kesalahan 10%, maka akan ditemukan titik diangka 50%. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil = $0,50 \times 66 = 33$, seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

NOMOGRAM HARRY KING UNTUK MENENTUKAN UKURAN SAMPEL DARI SUATU POPULASI SAMPAI 2.000



Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini pada tahap *pertama* menggunakan *proporsional Sampling* , yaitu mengambil sampel secara proporsional. Ini artinya bahwa setiap desa dari 11 desa populasi tersebut akan mendapatkan sampel dengan jumlah yang sama dengan membagi rata yaitu 66 sampel dibagi dengan 11 desa didapatkan 3 sampel setiap desa, sebagai berikut

No	Nama Desa	Populasi	Sampel
1	Ruwit	6	3
2	Berahan Wetan	6	3
3	Mutih Wetan	6	3
4	Bungo	6	3
5	Kenduren	6	3
6	Jungpasir	6	3
7	Jungsemi	6	3
8	Mutih Kulon	6	3
9	Jetak	6	3
10	Berahan Kulon	6	3
11	Tedunan	6	3
	Jumlah	66	33

Teknik penarikan sampel yang *kedua* dilakukan secara *purposive* yaitu sebagai berikut :

No	Tahun	Nana Desa	Kepala Desa	Ketua LKMD	Ketua BPD	Fasilitator desa	Tenaga Teknis Ds (Ush produk Tif)	Tenaga Teknis Ds (pengembangan prasarana/sarana)	Jml
1	98/99	1. Ruwit	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx				3
		2. Berahan Wetan		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			3
		3. Mutih Wetan				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	3
2	99/00	4. Bungo	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx				3
		5. Kenduren		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			3
		6. Jungpasir				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	3
		7. Jungsemi	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx				3
		8. Mutih Kulon		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			3
		9. Jetak				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	3
		10. Berahan Kulon	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx				3
		11. Tedunan				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	3
		Jumlah	4	7	7	7	4	4	33

Karena responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah responden yang sudah ditentukan, maka apabila ada responden yang berhalangan, maka akan diwakili responden lainnya yang memiliki kapasitas yang mendekati sama.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian yaitu di desa-desa yang pada tahun pertama (1998/1999) dan kedua (1999/2000) telah menerima dana PPK, guna mengumpulkan data primer. Data

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pengarah. Wawancara dilakukan kepada responden penerima manfaat dana PPK.
- 2) Angket atau daftar pertanyaan yaitu pengumpulan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden

Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua BPD, Fasilitator Desa, Tenaga Teknis Desa (usaha produktif), Tenaga Teknis Desa (Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa) untuk memperoleh jawaban. Daftar pertanyaan yang diberikan sudah dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang dapat dipilih dengan bebas oleh responden yang bersangkutan.

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK.
- b. Pengukuran, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur validitas data hasil penelitian dalam meneliti dan menilai hasil penelitian dengan sistem skoring, yaitu sebagai berikut :
 - Jawaban yang sangat mendukung diberi skor 4
 - Jawaban yang cukup mendukung diberi skor 3
 - Jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2
 - Jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu proses penyeleksian data untuk memisahkan data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan. Data yang belum lengkap dipayakan untuk segera dilengkapi. Data yang tidak diperlukan kemudian dibuang.

b. Coding.

Adalah proses pemberian kode pada data sesuai dengan variabel yang akan dibahas. Cara pemberian kode disesuaikan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

c. Tabulasi

Ialah proses pembuatan tabel-tabel baik tabel frekuensi maupun tabel skoring jawaban responden sehingga akan mempermudah dalam pembuatan laporan hasil penelitian.

9. Teknik Analisa Data

a. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa postulat maupun pendapat-pendapat responden yang bukan berupa data statistik. Hasil analisa kualitatif ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai pendukung hasil analisa kuantitatif.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan terhadap data yang berupa data statistik untuk mencari tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus-rumus statistik sebagai berikut :

1) Koefisien Korelasi Rank-Kendall

Metode ini digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam metode ini diharuskan membuat ranking terlebih dahulu secara teratur pada satu macam pengamatan tertentu kemudian menyesuaikan ranking yang telah tersusun tersebut dengan pasangannya yang telah ada (Samsubar Saleh, 1986:105). Derajat keeratan hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara variabel bebas (X1) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X2) dengan variabel terikat (Y), antara variabel bebas (X3) dengan variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N-1)}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank- Kendall

N = Jumlah pasangan observasi

S = Selisih antara nilai positif dan negatif terhadap masing-masing ranking yang diberikan

Rumus tersebut diatas digunakan jika dalam skor variabel tidak terbatas pada skor sama. Tetapi jika dalam penelitian ini telah terjadi penjumlahan skor antar individu dalam satu variabel menghasilkan skor yang sama besar, maka harus digunakan suatu faktor korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T_{xy} = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Jumlah observasi skor-skor +1 dan -1 untuk semua pasangan

N = Jumlah individu dalam sampel

T_x = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada X.

T_y = Faktor korelasi, yang menunjukkan jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan yang mempunyai observasi berangka sama pada Y.

Karena dalam penelitian menggunakan sampel besar yaitu lebih dari 10, maka untuk menguji signifikansi T hitung maka harus diuji dengan rumus :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N+1)}}}$$

Keterangan :

Z = Hasil uji T hitung yang akan konsultasikan

T = Koefisien korelasi Rank Kendall

N = Jumlah individu dalam sampel

Dengan taraf signifikansi 0,05 ini kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis Z pada tabel nilai Z untuk mengetahui nilai signifikansinya. Jika Z hitung > Z tabel pada taraf 0,05 berarti signifikan, hipotesis diterima. Jika Z hitung < Z tabel pada taraf 0,05 berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

2) Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Yaitu untuk menguji hipotesis mayor yang diajukan. Dalam hal ini adalah menghitung korelasi antara keempat variabel dalam penelitian ini yakni Komunikasi, Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Rumus statistiknya adalah sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K (N - N) - K E T}$$

Keterangan :

W = Koefisien Konkordansi Kendall

S = jumlah kuadrat deviasi observasi dari Mean R_j

K = Banyaknya Himpunan Ranking penjenjangan

N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

T = Faktor korelasi ranking yang berangka sama

K = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

E = Jumlah semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking.

Uji signifikansi :

$$X = K (N-1) W$$

Jika $X \text{ hitung} > t_{0,05}$ berarti signifikan, dan hipotesis diterima.

Jika $X \text{ hitung} < t_{0,05}$ berarti tidak signifikan, dan hipotesis ditolak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

Diskripsi responden dalam penelitian ini antara lain yang dilihat adalah Tingkat Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Mata Pencaharian. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 5
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN USIA

No	Tingkat Usia	Frekuensi	%
1	20 – 30 Tahun	6	18,18
2	31 – 40 Tahun	16	48,48
3	41 – 50 Tahun	6	18,18
4	Lebih dari 50 Tahun	5	15,15
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Identitas Resp No. 2

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu 16 orang atau 48,48% adalah berusia 31 – 40 tahun, 18,18% ialah responden yang berusia 20 – 30 tahun dan 41 – 50 tahun, sedangkan 15,15% adalah responden yang berusia lebih dari 50 tahun. Tingkat usia tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar para pengelola Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di desa-desa adalah tergolong usia produktif, sehingga diharapkan mampu melaksanakan PPK dengan lebih baik.

Tabel 6
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JUMLAH
KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-Laki	29	87,88
2	Perempuan	4	12,12
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Identitas Resp. No. 3

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa 87,88% atau 29 responden adalah laki-laki sedangkan 12,12% atau 4 responden adalah wanita. Hal ini berarti bahwa para wanita telah ikut serta atau berpartisipasi terhadap program-program pembangunan khususnya PPK dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Jadi peranan wanita masih tetap dibutuhkan dalam pelaksanaan PPK.

Tabel 7
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	Tamat SD	2	6,06
3	Tamat SLTP	5	15,14
4	Tamat SLTA	13	39,39
5	Diploma	4	12,12
6	Sarjana (S1)	9	27,27
7	Pasca Sarjana (S2)	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Identitas Resp No. 8

Responden yang tidak bersekolah ternyata tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan PPK, sementara yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan PPK adalah sebagian besar berpendidikan tamat SLTA yaitu 13

responden atau 39,39%. Dan 9 responden atau 27,27% adalah Sarjana (S1). Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi responden pada PPK adalah mereka yang memiliki pendidikan cukup, sekalipun jumlah sarjana di desa masih tergolong sangat kecil, namun cukup berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan khususnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tabel 8
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN MATA
PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	%
1	Petani	0	0,00
2	Pedagang	3	9,09
3	Guru	12	36,36
4	Aparat Desa	13	39,39
5	Swasta	5	15,15
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Identitas Resp No. 9

Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah bermatapencaharian sebagai Perangkat Desa yaitu sebanyak 13 orang atau 39,39% dan 12 orang atau 36,36% adalah sebagai guru. Yang bermatapencaharian petani adalah 0% karena semua responden memiliki lahan pertanian dimana lahan pertanian tersebut sebagai mata pencaharian sampingan. Data di atas menunjukkan bahwa Perangkat Desa dan Guru merupakan warga desa yang memiliki partisipasi terhadap keberhasilan program-program pembangunan desa. Oleh masyarakat desa Perangkat Desa dan Guru dipandang sebagai warga masyarakat desa yang memiliki tingkat pendidikan cukup mapan, sehingga harapan warga desa Perangkat Desa dan Guru adalah sebagai motor

penggerak di desa guna kemajuan dan kemakmuran desa. Khususnya dalam pengelolaan PPK.

2. Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pada variabel Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam penelitian ini, maka akan dimunculkan indikator-indikator program yang antara lain *pertama* proses yaitu penyediaan dana dan prasarana serta sarana penunjang perekonomian desa. *Kedua* adalah tujuan program PPK. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 9
PENGGUNAAN DANA PPK SESUAI RENCANA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	3	9,09
2	Setuju	29	87,87
3	Kurang Setuju	1	3,03
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 1

Data dari Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 29 responden atau 87,87% mengatakan bahwa dana PPK telah digunakan sesuai rencana yang ada. Karena penyusunan rencana tersebut sebenarnya sudah dibahas berkali-kali antara warga desa dengan PPK Sementara 1 responden atau 3,03% beranggapan bahwa penggunaan dana PP kurang sesuai dengan rencana. Hal ini benar adanya karena Peneliti mengadakan wawancara dengan seorang warga desa sebagai penerima dana sekaligus penerima manfaat PPK, yaitu Bapak Taufikul Hadi. Ia bertempat tinggal di desa Ruwit Kecamatan Wedung. Bapak Taufikul Hadi ini memiliki 2 usaha kecil yaitu warung kecil

yang menjual makanan ringan untuk anak-anak dan tambal ban sepeda dan sepeda motor. Ia tergolong warga desa yang memiliki syarat untuk meminjam dana PPK karena memiliki usaha warung kecil tersebut. Setelah memperoleh pinjaman, dana tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha warung makanan ringan tetapi dimanfaatkan untuk pengembangan sarana tambal ban yang berlokasi di depan rumahnya. Sarana tambal ban antara lain untuk suku cadang sepeda dan sepeda motor. Berjalan beberapa bulan Bapak Taufikul Hadi ini mempunyai kepentingan lain yaitu ingin membeli rumah sebagai tempat tinggal, pada hal beliau pada saat itu sudah memiliki rumah untuk tempat tinggal. Dan ia beranggapan bahwa rumah tersebut di jual dengan harga yang cukup murah. Dengan kepentingan itu akhirnya seluruh stok barang suku cadang sepeda dan sepeda motor habis terjual untuk menambah kekurangan pembelian rumah tersebut. Akhirnya usaha tambal ban tersebut menjadi bangkrut atau kurang menghasilkan, bahkan sering tutup. Kondisi demikian membuat Bapak Taufikul Hadi kebingungan karena sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2002 belum dapat melunasi angsuran pinjaman atau masih menunggak sebesar Rp. 412.000,- (Empat ratus dua belas ribu rupiah).

Tabel 10
DANA PPK UNTUK USAHA PRODUKTIF TELAH
MENCUKUPI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	33	100,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 2

Data diatas menunjukkan bahwa semua responden yaitu 33 orang atau sebesar 100% dari jumlah responden yang ada berpendapat bahwa dana PPK untuk kegiatan usaha produktif misalnya untuk kegiatan simpan pinjam yaitu pengembangan toko/warung kecil, pengembangan usaha pertanian, nelayan adalah sangat kurang. Proposal yang diusulkan untuk mendapatkan dana PPK untuk kegiatan usaha produktif tidak semuanya disetujui oleh pihak PPK karena keterbatasan dana. Hal ini terkadang membuat kecewa warga desa yang membutuhkan dana tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada para warga yang meminjam telah terjadi perbedaan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Hal ini disebabkan karena perkiraan jumlah warga yang akan meminjam dana PPK juga berbeda-beda. Ada yang dapat memberikan pinjaman mulai Rp. 100.000,- s/d Rp. 1.000.000,-, ada juga yang dapat memberi pinjaman antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 3.000.000,- Hal ini biasanya tergantung dari kesepakatan bersama antara pengelola dan warga desa. Peneliti juga telah wawancara dengan seorang warga desa sebagai penerima manfaat PPK, yaitu Bapak Nurhamid. Ia bertempat tinggal di desa Jetak dan

memiliki usaha toko/warung kecil. Bapak Nurhamid adalah seorang warga desa yang pernah mendapatkan pinjaman PPK untuk usaha warungnya yaitu sebesar Rp. 500.000,-. Ia berpendapat bahwa pinjaman ini sangat kecil sekali sehingga menurut pemilik warung tersebut kurang bermanfaat.

Tabel 11

**DANA PPK UNTUK MEMBANGUN /
MENGEMBANGKAN PRASARANA/SARANA
DESA TELAH MENCUKUPI**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	33	100,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 3

Sebanyak 33 responden atau 100% dari jumlah responden yang ada berpendapat bahwa dana PPK untuk membangun/mengembangkan prasarana maupun sarana desa untuk menunjang perekonomian desa adalah masih sangat kurang. Proposal yang diusulkan untuk mendapatkan dana PPK untuk membangun dan mengembangkan prasarana maupun sarana desa tidak semuanya dipenuhi oleh pihak PPK. Biasanya hanya akan dipenuhi yaitu antara 40% s/d 80% yang diusulkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang ada. Misalnya Sirtunisasi jalan di desa Jetak yang diusulkan sepanjang 1.000 meter, tetapi hanya disetujui 600 meter.

Tabel 12
PRASARANA YANG DIBANGUN ATAU DIKEMBANGKAN
TELAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,06
2	Setuju	31	93,93
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 4

Sebanyak 31 responden atau 93,93% mengatakan bahwa prasarana yang dibangun dan dikembangkan di desa-desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini terbukti bahwa PPK adalah salah satu program pembangunan yang mengembangkan model perencanaan *Bottom Up* yaitu menggali aspirasi yang berkembang atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat lapisan bawah. Khususnya untuk pembangunan fisik dari 11 desa sebagai penerima dana PPK sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat desa setempat. Misalnya untuk betonisasi, sirtunisasi, pembangunan bendung air dan lain-lain.

Tabel 13
PRASARANA YANG DIBANGUN ATAU
DIKEMBANGKAN SUDAH BERMANFAAT
BAGI MASYARAKAT DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	14	42,42
2	Setuju	13	39,39
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	4	12,12
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 5

Sebagian besar responden yaitu 14 orang atau 42,42% mengatakan bahwa prasarana yang dibangun atau dikembangkan dengan dana PPK adalah sangat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat desa misalnya untuk meningkatkan jalan, penjernihan air minum dan lain-lain.

Sementara 6,06% responden mengatakan kurang bermanfaat dan 12,12% atau 4 responden mengatakan tidak bermanfaat. Hal ini juga benar adanya, misalnya Bendung Gerak di desa Tedunan yang membutuhkan dana ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak bermanfaat sama sekali bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Hal ini disebabkan karena kondisi bangunan Bendungan air tersebut tidak sempurna sehingga menyebabkan air laut masih dapat masuk lewat bendungan tersebut yang kemudian mengalir ke sawah-sawah penduduk. Hal ini menyebabkan tanaman khususnya padi hasilnya kurang baik. Sebenarnya bendungan air ini dibangun dimaksudkan untuk menampung air hujan supaya tidak semuanya mengalir ke laut. Karena musim kemarau maka yang terjadi malah sebaliknya, yaitu air laut mengalir menuju ke sawah-sawah sekitar sungai.

Hal lain prasarana fisik yang kurang bermanfaat adalah terbangunnya saluran air di pinggiran jalan di desa Mutih Wetan sepanjang ± 500 meter. Saluran ini tidak dimanfaatkan untuk mengalirkan air dari bendung air yang sudah dibangun oleh DPU Pengairan, karena DPU sebenarnya sudah membangun saluran air menuju ke sawah-sawah, sehingga bangunan saluran air tersebut hanya dimanfaatkan apabila air dalam bendungan tersebut melebihi kapasitas bendungan.

Tabel 14
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MERENCANAKAN KEBUTUHAN DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,03
2	Setuju	25	75,75
3	Kurang Setuju	7	21,21
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 6

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang responden atau 75,75% mengatakan bahwa masyarakat desa diikutsertakan dalam merencanakan kebutuhan desa khususnya untuk PPK, hanya saja melalui perwakilan antar (Rukun Warga) atau RW. Perwakilan dalam satu RW biasanya adalah ketua RW, RT dan Tokoh Masyarakat. Hasil pertemuan di Kelurahan atau Balai Desa tersebut kemudian disampaikan kepada warga desa melalui RT masing-masing. Ketua RT dalam menyampaikan ke warganya biasanya melalui perkumpulan pengajian, karena jika diundang ke Rumah RT-nya biasanya jarang sekali datang. Sementara itu ada 7 responden atau 21,21% bahwa dalam merencanakan kebutuhan desa masyarakat kurang diikutsertakan. Hal ini terjadi biasanya terhadap orang-orang yang dipandang keras dan fanatik terhadap suatu hal, karena dikawatirkan akan mengganggu jalannya pertemuan di desa yang bersangkutan.

Tabel 15
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MELESTARIKAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	15	45,45
3	Kurang Setuju	17	51,51
4	Tidak Setuju	1	3,03
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 7

Sebagian besar responden yaitu 17 orang atau 51,51% mengatakan bahwa masyarakat desa kurang ikut serta dalam melestarikan PPK. Hal ini terbukti banyaknya tunggakan angsuran pinjaman oleh warga desa dan juga adanya prasarana desa yang sudah terbangun tidak terpelihara dengan baik. Misalnya betonisasi jalan sepanjang 1200 meter di desa Kenduren yang kondisinya pecah-pecah, jembatan kecil di desa Berahan Kulon yang mengalami rusak atau pecah dibagian samping. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan PPK biasanya dalam bentuk tenaga kerja untuk membantu pelaksanaan bangunan fisik, sementara partisipasi dalam bentuk dana untuk pemeliharaan prasarana yang telah terbangun kurang dapat terwujud, karena memang tidak cukup uang. Bahkan warga desa menghendaki untuk pemeliharaan prasarana diserahkan saja kepada desa, sementara Pemerintah Desa hanya memiliki dana sangat terbatas.

Tabel 16
PPK MAMPU MENINGKATKAN KEGIATAN
EKONOMI DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	10	30,30
3	Kurang Setuju	19	57,57
4	Tidak Setuju	4	12,12
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 8

Sebanyak 19 responden atau 57,57% mengatakan bahwa PPK masih kurang mampu dalam meningkatkan kegiatan ekonomi desa. Mengingat prasarana yang terbangun sangat terbatas dan pinjaman untuk kegiatan usaha produktif juga sangat kecil. Untuk melihat sejauhmana PPK mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di desa tidak bisa hanya dilihat dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun tetapi harus lebih dari itu, karena keterbatasan pinjaman tersebut adalah yang menyebabkan kelambatan perkembangan perekonomian di desa. Modal untuk pinjaman hanya berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- bahkan ada yang berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Apabila melihat kondisi sekarang maka modal tersebut memang kurang berarti, tetapi modal tersebut tetap dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Tabel 17
PPK SEBAGAI LAPANGAN KERJA BARU

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	2	6,06
3	Kurang Setuju	1	3,03
4	Tidak Setuju	30	90,90
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 9

Hampir semua responden dalam penelitian ini yaitu 30 dari 33 responden atau 90,90% mengatakan bahwa PPK tidak mampu membuka lapangan kerja baru di desa. Hal ini disebabkan karena minimnya pinjaman untuk usaha produktif. Prasarana fisik yang dibangun tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja baru di desa, karena sebagian besar warga desa di rekrut dalam bentuk partisipasi atau tidak memperoleh upah atau hanya memperoleh uang makan. Disamping itu ada 2 responden atau 6,06% mengatakan bahwa PPK mampu membuka lapangan kerja baru. Hal ini benar adanya karena telah dibangun dan dikembangkan bangunan pasar di desa Jungsemi. Menurut pendapat Solikhatun, seorang pedangan es campur didekat pasar tersebut mengatakan bahwa dahulu sebelum pasar ini dikembangkan seperti sekarang ini jumlah pedangan \pm 60 orang, sekarang ini setelah pasar dikembangkan, jumlah pedagang kecil meningkat \pm 100%. Hal ini disebabkan karena pasar menjadi tambah lebar dan pengaturan tempatnya proporsional, sehingga memungkinkan pedangan baru ikut berjualan di

pasar tersebut. Ini berarti bahwa PPK mampu menambah tenaga kerja baru khususnya pedagang kecil.

Tabel 18

**PPK MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DESA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	8	24,24
3	Kurang Setuju	25	75,75
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 10

75,75% responden mengatakan bahwa PPK kurang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara langsung. Hal ini disebabkan karena jumlah pinjaman yang terlalu kecil. Bangunan prasarana yang terbangun juga sangat terbatas. Sementara itu 24,24% atau 8 orang responden mengatakan bahwa PPK mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara langsung. Hal ini terbukti bahwa bangunan pasar di desa Jungsemi ini mampu menambah jumlah pedagang baru yang berjualan di pasar tersebut, yang berarti juga mampu meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat desa tersebut.

Tabel 19

**PPK MAMPU MENINGKATKAN KEMAMPUAN
LEMBAGA DESA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	31	93,93
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 11

Hampir semua responden yaitu 31 orang mengatakan bahwa PPK dapat meningkatkan kemampuan Lembaga di desa. Karena yang terlibat dalam Lembaga desa selalu diikutsertakan, mulai dari proses sosialisasi program, penggalan ide-ide pembangunan desa, perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelestariannya. Disamping itu sebagian besar desa-desa di Kecamatan Wedung juga pernah menerima bantuan selain PPK misalnya PDMDKE dan yang lainnya. Sehingga dengan dasar pengalaman tersebut, maka Lembaga Desa tersebut dalam melaksanakan PPK tergolong mudah.

3. Komunikasi

Variabel Komunikasi dalam penelitian ini akan memunculkan indikator-indikator antara lain komunikasi kepada tingkat yang lebih tinggi, komunikasi kepada tingkat yang lebih rendah dan komunikasi horisontal atau tingkat yang sama.

Tabel 20

FASILITATOR DESA SERING MELAKSANAKAN SOSIALISASI PPK KE DESA-DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,06
2	Setuju	31	93,93
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 12

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 31 responden atau 93,93% mengatakan bahwa para pengelola PPK khususnya Fasilitator Desa dalam melaksanakan sosialisasi PPK ke desa-desa tergolong cukup. Dalam sosialisasi PPK ini Fasilitator biasanya menyampaikannya ke perkumpulan warga misalnya perkumpulan pengajian, jumatan di masjid-masjid. Mengingat sebagian besar warga desa di kecamatan Wedung ini adalah beragama Islam dan gemar melakukan kegiatan-kegiatan pengajian baik dalam desa itu sendiri maupun antar desa, maka momentum ini dimanfaatkan bagi para Fasilitator Desa untuk sosialisasi program tersebut.

Tabel 21

KEJELASAN INFORMASI DALAM SOSIALISASI PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,03
2	Setuju	32	96,96
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 13

Sebanyak 32 responden atau 96,96% mengatakan bahwa informasi yang sampaikan oleh pengelolaan PPK di desa atau Fasilitator Desa adalah cukup jelas. Masyarakat desa lebih cepat memahami karena sebelumnya juga pernah mendapatkan dana-dana untuk program pembangunan seperti PDMDKE juga melalui proses sosialisasi ke masyarakat. Jadi cara yang ditempat juga hampir sama. Disamping itu juga bahwa PPK juga telah menyediakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

dan Petunjuk Teknis (Juknis) hanya saja distribusinya khusus untuk para pelaksana atau pengelola program, tidak sampai kepada warga desa karena keterbatasan jumlah cetakan.

Tabel 22
SOSIALISASI PPK MELALUI SELEBARAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	1	3,03
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	30	90,90
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 14

Sejumlah 30 responden atau 90,90 % menyatakan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi PPK ke desa-desa tidak pernah menggunakan selebaran. Karena selebaran dipandang tidak efisien dan pemborosan serta membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak, sehingga kurang efektif.

Tabel 23
SOSIALISASI PPK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	22	66,66
3	Kurang Setuju	8	24,24
4	Tidak Setuju	3	9,09
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 15

Sebanyak 22 responden atau 66,66% mengatakan bahwa dalam mensosialisasikan PPK ke desa-desa adalah dengan menggunakan papan informasi atau papan pengumuman, baik yang berada di kantor Kepala

Desa maupun di RW-RW bahkan di RT-RT. Sementara yang menyatakan jarang menggunakan papan pengumuman bahkan tidak pernah menggunakan papan pengumuman adalah sebesar 24,24% dan 9,09%. Hal ini disebabkan karena tidak setiap RW maupun RT memiliki papan informasi. Papan informasi kurang dianggap penting karena informasi dapat disampaikan melalui perkumpulan pengajian-pengajian di desa-desa. Bahkan menurut Nur Yatun seorang Fasilitator Desa di desa Kenduren mengatakan bahwa dalam rangka sosialisasi PPK tersebut hanya ditempelkan pada pal listrik di desa tersebut. Ini sebenarnya tidak menarik bagi warga yang ingin membacanya bahkan tidak informatif.

Tabel 24
SOSIALISASI PPK MELALUI PERKUMPULAN
PENGAJIAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	31	93,93
2	Setuju	2	6,06
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 16

Sebagian besar yaitu sebanyak 31 responden atau 93,93% mengatakan bahwa sosialisasi PPK ke desa-desa adalah melalui perkumpulan pengajian warga. Mengingat sebagian besar warga desa di Kecamatan Wedung ini adalah beragama Islam, maka momentum pengajian ini dimanfaatkan untuk sosialisasi PPK. Pelaksanaannya yaitu para Fasilitator Desa atau pengelola PPK di desa ini mengikuti

pengajian-pengajian yang diadakan oleh desa-desa yang memperoleh bantuan PPK tersebut.

Tabel 25

**SOSIALISASI PPK MELALUI PERKUMPULAN WARGA
DI BALAI DESA ATAU DI RUMAH KEPALA DESA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	7	21,21
3	Kurang Setuju	24	72,72
4	Tidak Setuju	2	6,06
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 17

Tabel diatas terlihat bahwa 24 responden atau 72,72% mengatakan bahwa sosialisasi PPK dilaksanakan melalui perkumpulan warga di Balai Desa atau Rumah Kepala Desa adalah kurang disetujui, dengan alasan bahwa sebagian besar warga desa belum biasa untuk datang ke kantor desa atau ke rumah Kepala Desa dan kebanyakan mempunyai perasaan bahwa kami ini orang kecil tidak pantas ke kantor desa atau ke Rumah Kepala Desa. Dengan demikian sebagian besar warga desa kurang peduli terhadap sosialisasi PPK, jika hal itu dilaksanakan di kantor desa. Mereka lebih mengutamakan mencari nafkah untuk anak isteri.

Tabel 26

SARAN DAN MASUKAN DEMI KEBERHASILAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	4	12,12
2	Setuju	27	81,81
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 18

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 81,81% responden mengatakan bahwa cukup sering memberikan saran dan masukan demi keberhasilan PPK di desa masing-masing. Sementara 6,06% persen menyatakan jarang memberikan saran dan masukan. Karena mereka menganggap bahwa masing-masing pengelola PPK sudah mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu harus mendapat saran dan masukan secara terus menerus, disamping itu pengelola sudah dianggap sebagai orang yang memiliki cukup pendidikan dan pengalaman, sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut adalah hal yang sudah biasa.

Tabel 27
PENERIMAAN SARAN DAN MASUKAN DEMI
KEBERHASILAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	29	87,87
3	Kurang Setuju	4	12,12
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 19

87,87% responden berpendapat bahwa saran dan masukan demi keberhasilan PPK di desa-desa cukup diterima oleh para pengelola dan pelaksana. Sejak awal program ini adalah memperhatikan aspirasi warga desa, sehingga masukan-masukan tersebut cukup mendapat perhatian. Sementara 12,12% responden menyatakan bahwa saran dan masukannya kurang diterima, karena saran dan masukannya tersebut belum bisa

diterima oleh sebagian besar warga atau anggota musyawarah. Dan ini sering terjadi dalam era demokrasi seperti sekarang ini. Sekalipun demikian terkadang membuat sakit hati karena saran dan masukannya tidak diterima, dan yang paling tidak menguntungkan lagi jika saran dan masukan tersebut sudah dianggap yang paling benar.

Tabel 28
SURAT SEBAGAI MEDIA MENYAMPAIKAN SARAN DAN MASUKAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,06
2	Setuju	23	69,69
3	Kurang Setuju	6	18,18
4	Tidak Setuju	2	6,06
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 20

Sebagian besar responden yaitu 23 orang atau 69,69% menyatakan bahwa media surat adalah cukup tepat sebagai media penyampaian saran dan masukan kepada para pengelola atau pelaksana PPK di desa-desa demi keberhasilan PPK. Sementara 18,18% menyatakan bahwa surat masih kurang tepat sebagai media penyampaian saran dan masukan. Saran dan masukan lebih baik disampaikan langsung kepada Ketua RT dan RW, kemudian RT dan RW tersebut melangsungkan kepada para pengelola PPK di tingkat desa bahkan ke tingkat kecamatan.

Tabel 29
PERKUMPULAN WARGA DI KANTOR KEPALA DESA
ATAU DI RUMAH KEPALA DESA SEBAGAI MEDIA
MENYAMPAIKAN SARAN DAN MASUKAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	10	30,30
3	Kurang Setuju	23	69,69
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 21

Sebanyak 23 responden atau 69,69% menyatakan bahwa perkumpulan warga desa di Kantor Kepala Desa/Rumah Kepala Desa sebagai media menyampaikan saran dan masukan adalah dianggap kurang tepat. Hal ini disebabkan karena warga masih enggan dan memiliki rasa tidak enak jika saran dan masukan itu langsung disampaikan kepada Kepala desa atau pengelola PPK, tetapi yang mereka lakukan adalah menyampaikannya terlebih dahulu kepada Ketua RT atau RW setempat.

Tabel 30
KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI PELAKSANAAN
TUGAS PPK DI DESA-DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	4	12,12
2	Setuju	25	75,75
3	Kurang Setuju	4	12,12
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 22

75,75% atau 25 responden menyatakan bahwa komunikasi cukup sering digunakan untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas PPK di desa.

Sehingga yang terjadi adalah pelaksanaan koordinasi antara para pelaksana atau pengelola di desa berjalan dengan baik, tidak terjadi perselisihan. Sementara 12,12% menyatakan bahwa komunikasi masih kurang dilakukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan PPK antar para pengelola. Hal ini menyebabkan koordinasi kurang berjalan dengan baik karena telah terjadi perbedaan pendapat antara para pelaksana di desa. Seperti diakui oleh Seorang Ketua badan Perwakilan Desa (BPD) di desa Ruwit yaitu Bapak Abdul Rosyid. Ia kurang sependapat dengan Ketua LKMD karena sebagai Ketua BPD tidak diperkenankan untuk mengetahui seberapa besar uang sudah dipinjamkan kepada warga desa dan bagaimana tentang kejelasan pembagian hasil kegiatan simpan pinjam tersebut. LKMD dianggap tidak transparan dalam melaksanakan tugas PPK.

Tabel 31
KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI DALAM
PEMFAKAHAN MASALAH PPK DI DESA-DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,03
2	Setuju	29	87,87
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	1	3,03
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 23

87,87% responden atau 29 orang menyatakan bahwa komunikasi cukup sering digunakan untuk koordinasi dalam pemecahan masalah PPK dilapangan. Misalnya dalam menangani tunggakan pinjaman. Koordinasi secara intensif antara para pelaksana PPK di desa terus dilakukan.

Pendekatan-pendekatan kepada para penunggak juga dilakukan secara intensif pula. Dengan harapan terjadi koordinasi yang baik, maka masalah akan cepat terpecahkan. Sementara 2 orang responden atau 6,06% mengatakan bahwa komunikasi kurang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan. Hal ini memang terjadi karena para petugas lapangan enggan bahkan tidak sabar untuk menarik kepada mereka yang nunggak, yang pada akhirnya tidak mau berbuat apapun, sehingga masalah tersebut menjadi berlarut-larut tidak dapat selesai.

Tabel 32

**KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI PELAKSANAAN
TUGAS PPK ANTAR DESA PENERIMA DANA PPK**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	4	12,12
3	Kurang Setuju	18	54,54
4	Tidak Setuju	11	33,33
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 24

Sebagian besar yaitu 18 responden atau 54,54% berpendapat bahwa komunikasi kurang digunakan untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas PPK antar desa yang sama-sama menerima dana PPK. Bahkan 11 orang responden atau 33,33% mengatakan bahwa koordinasi tidak pernah dilakukan antar desa. Adanya anggapan bahwa koordinasi yang terpenting adalah koordinasi ke dalam artinya antar pengelola dan antar warga. Karena yang merencanakan adalah masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal ini berdampak pada hasil kebijakan sering berbeda-beda antara

desa yang satu dengan desa lainnya. Misalnya soal penentuan bunga pinjaman, agunan pinjaman dan lain-lain.

Tabel 33
KOMUNIKASI UNTUK KOORDINASI PEMECAHAN
MASALAH ANTAR DESA PENERIMA DANA PPK

No	Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	5	15,15
3	Kurang Setuju	18	54,54
4	Tidak Setuju	10	30,30
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 25

Sebanyak 18 responden atau 54,54% mengatakan bahwa komunikasi kurang dimanfaatkan untuk koordinasi dalam rangka pemecahan masalah antar desa. Adanya anggapan bahwa masalah masing-masing desa adalah berbeda-beda begitu juga karakternya, sehingga pemecahannyapun juga berbeda-beda. Jika ada masalah, maka berusaha diatasi sendiri oleh desa tersebut dan apabila tidak terselesaikan, maka melibatkan pihak kecamatan. Dalam hal-hal tertentu berkoordinasi dengan desa lain, misalnya usulan sirtunisasi jalan perbatasan antara desa satu dengan desa yang lain. Bahkan 10 responden mengatakan bahwa koordinasi tidak pernah dilakukan dengan desa lain. Adanya anggapan bahwa jika terjadi masalah, maka masalah tersebut adalah aib bagi desa yang bersangkutan, sehingga tidak perlu dikoordinasikan dengan desa lain dan muncul anggapan juga bahwa masalah yang tidak terselesaikan

tersebut disebabkan karena kurang tanggung jawabnya para pengelola PPK di desa tersebut.

4. Kemampuan Organisasi

Pada variabel Kemampuan Organisasi dalam penelitian ini akan dimunculkan indikator-indikator antara lain staf/tenaga pengelola, wewenang, dana, fasilitas, keterampilan, dan pengalaman. Dan untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 34
TERCUKUPINYA JUMLAH TENAGA PENGELOLA
PPK DI DESA-DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	31	93,93
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 26

Hampir semua responden yaitu 31 orang atau 93,93% mengatakan bahwa jumlah tenaga sebagai pengelola PPK di desa-desa telah tercukupi. Khususnya tenaga administratif. Bagi 2 orang responden yang menyatakan bahwa tenaga pengelola masih kurang, disebabkan karena banyaknya masalah yang timbul dalam pelaksanaan PPK di desa khususnya masalah tunggakan pinjaman. Seperti dikatakan oleh Erma, seorang Tenaga Teknis Desa di Desa Mutih Wetan bahwa sebagai pengelola PPK harus memiliki kesabaran yang tinggi dan ulet. Ada opini yang berkembang di masyarakat desa bahwa uang yang dipinjamkan adalah uang rakyat sehingga tidak

perlu dikembalikan atau diangsur. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang meminjam lebih besar dan belum juga melunasi malahan tidak pernah mendapat tegoran sedangkan orang-orang yang pinjamannya kecil malahan sering mendapatkan tegoran. Hal ini dirasa tidak adil, sehingga yang terjadi adalah ia akan melunasi jika orang yang pinjamannya besar tersebut sudah melunasinya terlebih dahulu. Kondisi demikian membuat malas para pengelola PPK karena semua warga khususnya yang berhutang tidak menyadari arti pelestarian PPK.

Tabel 35

**PENDELEGASIAN WEWENANG/PERINTAH DARI
KECAMATAN KEPADA DESA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	7	21,21
2	Setuju	26	78,78
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 27

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pendelegasian perintah dari Tingkat Kecamatan kepada Desa telah terjadi dengan baik. Artinya desa di beri kepercayaan penuh untuk mengelola PPK. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) juga langsung diberikan ke desa-desa sebagai pedoman pelaksanaan. Jika ada informasi baru langsung disampaikan kepada desa. Hal ini disebabkan karena tenaga di Tingkat Kecamatan juga telah mencukupi, sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan PPK di desa-desa.

Tabel 36
TERCUKUPINYA INSENTIF BAGI PARA PENGELOLA
PPK DI DESA-DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	33	100,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 28

Seluruh responden yaitu 33 orang menyatakan bahwa insentif untuk para pengelola sangat kecil. Artinya tidak sebanding dengan tenaga, waktu, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan PPK di desa. Kalau tidak memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, kemungkinan para pengelola ini semua pada mundur. Disamping itu banyaknya masalah-masalah yang muncul khususnya tunggakan pinjaman. Semakin banyak masalah yang harus diselesaikan berarti besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Besarnya bunga pinjaman antara desa yang satu dengan desa yang lain adalah berbeda-beda. Rata-rata antara 1,5% sampai dengan 2,5%. Pihak Kecamatan mendapatkan 1% dan pihak Desa memperoleh 0,5% sampai dengan 1,5%. Apabila uang yang berputar itu kecil, maka insentif yang didapat oleh para pengelola juga kecil. Diakui oleh Bapak Sarifudin sebagai penarik tunggakan pinjaman di desa Ruwit bahwa selama sebulan ia melaksanakan penarikan tunggakan kepada warga desa sebanyak 4 kali. Setiap kali putaran memakan waktu \pm 2,5 Jam dengan menggunakan kendaraan milik pribadi, tanpa di kasih uang bensin. Yang

didapat adalah persentase dari uang yang di dapat. Biasanya sebagai insentif setiap bulannya berkisar antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 15.000,-. Insentif ini sangat kecil sekali, sehingga untuk menyenangkan hatinya, ia mengatakan bahwa tugas ini adalah bentuk pengandian kepada masyarakat. Insentif yang sangat kecil ini sebenarnya membuat malas bagi para pelaksana PPK di desa, bahkan pernah terjadi di desa Berahan Wetan para pengelola ini tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai penarik angsuran pinjaman, karena insentifnya tidak mencukupi untuk biaya operasional, khususnya jika hal ini dilaksanakan oleh tenaga yang memang mengharapkan upah yang selayaknya.

Tabel 37

**TERSEDIANYA FASILITAS/PERALATAN UNTUK
PELAKSANAAN PPK**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	33	100,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 29

Seluruh responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa fasilitas atau peralatan tidak disediakan oleh PPK. PPK hanya menyediakan barang pakai habis saja (Alat Tulis). Dalam pelaksanaanya para pengelola biasanya meminjam peralatan seperti mesin ketik, komputer dari desa yang bersangkutan atau dari sekolah-sekolah terdekat yang memiliki peralatan tersebut. Karena tidak adanya sarana yang memadai, maka sering terjadi

keterlambatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan tugas. Demi kelancaran pelaksanaan PPK di desa-desa memestinya PPK menyediakan anggaran untuk pembelian fasilitas atau peralatan.

Tabel 38
MEMBERIKAN PELATIHAN DAN KETERAMPILAN
SEBELUM MELAKSANAKAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	33	100,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber ; Quesioner No. 30

Seluruh responden mengatakan bahwa pelatihan dan keterampilan sebelum melaksanakan PPK di desa-desa memang diberikan oleh pihak kecamatan tetapi dirasa kurang, karena pelatihan ini hanya diberikan kepada para pengelola saja, semestinya warga masyarakat khususnya tokoh masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedur yang baik dalam melaksanakan PPK. Sehingga apabila terjadi permasalahan sebagai tokoh masyarakat juga mengerti letak permasalahan tersebut.

Tabel 39
**PELAKSANAAN PPK MENGIKUTI PROSEDUR
 YANG BERLAKU**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,03
2	Setuju	26	78,78
3	Kurang Setuju	6	18,18
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 31

Sebagian besar responden yaitu 26 orang menyatakan bahwa dalam melaksanakan PPK di desa-desa selalu mengikuti prosedur yang berlaku. Karena Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Pihak PPK memang sudah cukup jelas. Disamping itu tingkat pendidikan para pengelola di desa-desa sebagian besar adalah sebagai guru yang memiliki pendidikan cukup. Semetara 6 responden atau 18,18% mengatakan bahwa dalam melaksanakan PPK kurang mengikuti prosedur yang berlaku karena kurang paham mengenai Juklak maupun Juknis yang ada. Hal ini disebabkan karena sebagian dari pengelola PPK di desa-desa memiliki tingkat pendidikan rendah misalnya saja Lulus SD, sehingga memungkinkan dalam memahami prosedur tersebut sangat lambat bahkan terjadi salah persepsi yang menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya

Tabel 40
MELAKUKAN ANTISIPASI SEBELUM MUNCULNYA
MASALAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	15	45,45
3	Kurang Setuju	16	48,48
4	Tidak Setuju	2	6,06
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 32

Data di atas menunjukkan bahwa 16 responden atau 48,48% mengatakan bahwa antisipasi kurang dilakukan terhadap masalah yang akan muncul. Bahkan 6,06% responden berpendapat bahwa antisipasi tidak pernah dilakukan. Misalnya dalam pelaksanaan simpan pinjam, bagi mereka yang akan meminjam hanya diberi tahu bahwa harus mengasur setiap bulan pada tanggal tertentu dengan besaran tertentu. Sanksi-sanksi tidak diberlakukan, misalnya terjadi tunggakan harus menambah bunga sesuai aturan dan lain-lain. Sementara 15 responden atau 45,45% mengatakan bahwa demi kelancaran pelaksanaan PPK di desa-desa dilakukan antisipasi terhadap masalah yang akan muncul. Seperti diakui oleh Bapak Sirothol, Ketua LKMD di desa Bungo. Ia mengatakan bahwa dalam rangka antisipasi permasalahan PPK khususnya pada bidang simpan pinjam telah diterapkan sistem agunan. Sekalipun oleh pihak PPK tidak diperbolehkan. Pengalaman masa lalu banyak tunggakan pinjaman yang tidak terselesaikan. Sehingga sebagai tanggung jawab moral sebagai pengelola PPK di desa, ia menerapkan sistem agunan bagi para peminjam.

Bentuk agunan biasanya berupa BPKB, Surat Tanah, itupun jika ada. Jika tidak memiliki, maka antisipasi dilakukan melalui bentuk-bentuk intimidasi kepada warga, yaitu jika tidak dapat membayar pinjaman, maka akan di lelang sarana yang ada di Rumah Targga misalnya TV, Tape rekorder, Radio, Almari dan lain-lain.

Tabel 41

SETIAP MASALAH DIATASI DENGAN CEPAT

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	20	60,60
3	Kurang Setuju	13	39,39
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 33

Dari data diatas dapat dilihat bahawa sebanyak 20 responden menyatakan setiap ada masalah dalam pelaksanaan PPK di desa-desa diatasi dengan cepat. Misalnya permasalahan tunggakan pinjaman. Setelah penunggak pinjaman itu diberi surat tegoran dari pihak desa, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, maka pihak desa atau para pengelola langsung mendatangi ke rumah-rumah penunggak pinjaman. Sementara 13 orang responden menyatakan bahwa setiap muncul masalah agak lambat penanganannya, karena harus lapor dahulu dengan pihak kecamatan. Dan permasalahan itu akan diselesaikan antara desa dan pihak kecamatan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tabel 42
PPK DI DESA-DESA DILAKSANAKAN DENGAN
MUDAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	25	75,75
3	Kurang Setuju	8	24,24
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 34

Sejumlah 25 responden 75,75% berpendapat bahwa PPK di desa-desa dapat dilaksanakan dengan cukup mudah. Karena sebagian besar desa-desa tersebut pernah menerima bantuan program pembangunan sejenis PPK misalnya PMDKE dan lainnya, sehingga para pengelolanya sudah memiliki pengalaman dalam mengelola program pembangunan. Sementara itu 8 responden atau 24,24% mengatakan bahwa PPK di desa-desa agak sulit dilaksanakan. Hal ini juga benar adanya bahwa kesulitan itu terletak pada administrasi yang terlalu rumit. Dan biasanya orang yang menangani tidak semua mempunyai dasar tentang ilmu administrasi, sehingga dirasakan sulit.

5. Pengawasan

Indikator-indikator yang akan dimunculkan dari Variabel Pengawasan dalam penelitian ini antara lain adalah penetapan standart, pengukuran hasil kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Untuk lebih detailnya hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 43

KETERSEDIAAN ATURAN DALAM PELAKSANAAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	5	15,15
2	Setuju	25	75,75
3	Kurang Setuju	3	9,09
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 35

Memperhatikan data di atas telah jelas bahwa 75,75 responden mengatakan bahwa aturan-aturan dalam melaksanakan PPK adalah cukup tersedia. Aturan-aturan tersebut berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan aturan-aturan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan PPK dilapangan. Sementara itu 9,09% responden mengatakan bahwa aturan-aturan yang ada tersebut masih kurang. Biasanya yang terjadi adalah munculnya masalah baru yang penyelesaiannya memerlukan aturan, tetapi aturan tersebut belum tersedia, sehingga penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.

Tabel 44

ATURAN PELAKSANAAN PPK MUDAH DIPAHAMI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	4	12,12
2	Setuju	26	78,78
3	Kurang Setuju	3	15,15
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 36

Dari aturan-aturan yang ada, seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan aturan-aturan lainnya sebagian

besar responden yaitu 78,78% mengatakan bahwa aturan-aturan tersebut adalah cukup jelas dan cukup mudah dipahami. Karena dibanding dengan program-program pembangunan yang lain seperti PMDKB, maka aturan-aturan dalam PPK dianggap lebih lengkap dan cukup detail. Sementara 15,15% responden berpendapat bahwa aturan-aturan yang ada agak sulit dimengerti dan diterapkan karena terlalu rumit, khususnya untuk administrasi. Bagi para pengelola yang belum menguasai tentang administrasi memang dirasakan sangat sulit.

Tabel 45

**PENENTUAN STANDAR SESUAI DENGAN KONDISI RIIL
MASYARAKAT DESA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	6	18,18
2	Setuju	25	75,75
3	Kurang Setuju	1	3,03
4	Tidak Setuju	1	3,03
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Questioner No. 37

Menurut data di atas bahwa sebagian besar responden yaitu 75,75% mengatakan bahwa standar yang berupa aturan-aturan sebenarnya sudah cukup sesuai dengan kondisi riil di masyarakat desa. Karena standar ini dibuat sebenarnya sudah memperhitungkan kondisi di masyarakat dan perencanaan kebutuhan desa juga telah menjaring aspirasi yang berkembang di desa. Sebesar 3,03% responden mengatakan bahwa standar tersebut kurang sesuai dengan kondisi riil dimasyarakat bahkan 3,03% responden juga mengatakan standar tidak sesuai sama sekali dengan

kondisi riil di masyarakat. Hal ini terungkap karena aturan-aturan itu dirasakan cukup sulit untuk dilaksanakan dilapangan.

Tabel 46
PELAKSANAAN KEGIATAN PPK SESUAI DENGAN
RENCANA KEBUTUHAN DESA

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	6	18,18
2	Setuju	27	81,81
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 38

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan PPK telah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Desa. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden yaitu 81,81% mengatakan hal tersebut. Dalam PPK perencanaan di buat mendasarkan pada aspirasi desa atau kebutuhan desa melalui musyawarah desa. Sehingga pelaksanaan kegiatannya juga mengacu kepada rencana yang telah dibuat. Disamping itu juga dalam pelaksanaannya masyarakat juga terlibat secara langsung khususnya pada bangunan fisik di desa, sehingga secara langsung pelaksanaannya terkontrol.

Tabel 47
HASIL KEGIATAN PPK SESUAI DENGAN STANDAR
KERJA YANG TELAH DITETAPKAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	6	18,18
2	Setuju	27	81,81
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 39

Hasil kegiatan PPK yang dilaksanakan di desa telah sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan oleh pihak PPK. Karena data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 81,81% mengatakan hal tersebut. Karena PPK menerapkan sistem prestasi artinya bahwa desa-desa yang memiliki prestasi baik dalam melaksanakan PPK, maka prestasi tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelayakan desa penerima dana PPK untuk tahun berikutnya. Sehingga standar kerja yang ditetapkan oleh PPK cenderung diikuti sebagaimana adanya.

Tabel 48
PENCAWASAN PREVENTIF TERHADAP
PELAKSANAAN PPK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	1	3,03
2	Setuju	5	15,15
3	Kurang Setuju	26	78,78
4	Tidak Setuju	1	3,03
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No.40

Pengawasan preventif cenderung kurang dilakukan dalam mengontrol pelaksanaan PPK di desa-desa. Hal ini ditunjukkan pada data tabel di atas, bahwa 78,78% responden berpendapat pengawasan preventif masih tergolong kurang. Baik yang dilakukan oleh pihak Kabupaten, pihak Kecamatan, Pihak Desa maupun oleh masyarakat sendiri. Pengawasan dari Kabupaten hanya 2 kali dalam satu tahun bahkan terkadang tidak pernah. Pengawasan pihak Kecamatan dilakukan satu bulan sekali, terkadang lebih jika ada permasalahan. Pengawasan dari desa biasanya dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, ini jarang dilakukan khususnya untuk kegiatan simpan pinjam. Pengawasan dari masyarakat secara langsung jarang sekali dilakukan khususnya untuk usaha simpan pinjam, tetapi untuk kegiatan bangunan fisik, masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi mengontrol bahkan ikut membantu dalam pelaksanaannya.

Tabel 49

SETIAP PENYIMPANGAN PPK DILAKUKAN TEGORAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	23	69,69
2	Setuju	9	27,27
3	Kurang Setuju	1	3,03
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 41

Sebagian besar yaitu di atas 50% mengatakan bahwa setiap terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan PPK dilapangan dilakukan tegoran, baik berupa tegoran lesan maupun tegoran tertulis. Khususnya untuk kegiatan simpan pinjam didatangi langsung oleh petugas. Sementara 3,03%

mengatakan bahwa tegoran tidak diberikan apabila Aparat Desa yang meminjam. Tetapi tidak semua seperti ini. Ini hanya dalam kasus desa tertentu saja.

Tabel 50
TINDAK LANJUT TEGORAN ADA PERUBAHAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat Setuju	2	6,06
2	Setuju	29	87,87
3	Kurang Setuju	2	6,06
4	Tidak Setuju	0	0,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 42

87,87% responden mengatakan bahwa setiap yang bersangkutan memperoleh tegoran baik secara lisan maupun secara tertulis cukup ada perubahan sikap yaitu adanya kemauan untuk memperbaiki diri atau mengangsur tunggakannya. Sementara 6,06% responden mengatakan bahwa kurang ada perubahan ke arah perbaikan sekalipun sudah ditegor baik secara lisan dan tertulis. Dan inilah orang yang tergolong bandel, banyak alasan yang disampaikan mulai dari gagal panen, berdagang tidak untung dan lain-lain

Tabel 51
SANKSI DITERAPKAN KEPADA YANG MENYIMPANG

No	Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	0	0,00
2	Setuju	0	0,00
3	Kurang Setuju	0	0,00
4	Tidak Setuju	33	100,00
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Quesioner No. 43

Seluruh responden yaitu 100% menyatakan bahwa sanksi tidak diterapkan kepada mereka yang telah mendapat tegoran khususnya tegoran secara tertulis. Sanksi-sanksi tersebut sebenarnya sudah disepakati bersama oleh warga desa yang bersangkutan, baik itu berupa tambahan bunga maupun pelelangan sarana yang dimiliki yang bersangkutan, tetapi memang sulit untuk dilakukan. Petugas sebenarnya ingin melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi terkadang muncul rasa iba terhadap kondisi riil masyarakat. Sehingga berat rasanya untuk menagih atau melelang barang yang dimiliki oleh penunggak pinjaman.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kategori Variabel Penelitian

Dalam rangka menguji hipotesa-hipotesa dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pengklasifikasian pada tiap-tiap variabel, variabel yang dimaksud adalah variabel Implementasi PPK (Y), variabel Komunikasi (X1), variabel Kemampuan Organisasi (X2) dan variabel Pengawasan (X3). Klasifikasi ini didasarkan pada penjumlahan skor-skor yang mewakili masing-masing variabel.

a. Kategori Variabel Implementasi PPK

Tabel 52

TOTAL SKOR VARIABEL IMPLEMENTASI PPK

Total Skor	Frekuensi	%
21	2	6,1
22	3	9,1
23	2	6,1
24	6	18,2
25	6	18,2
26	6	18,2
27	6	18,2
29	1	3,0
30	1	3,0
Total	33	100,0

Sumber : Penjumlahan q1 s/d q11

Hasil penjumlahan masing-masing qoesioner dalam satu variabel ini akan memberikan gambaran tentang distribusi variabel yang akan diteliti. Hasil penjumlahan terhadap variabel implementasi PPK yang merupakan variabel dependen (terpengaruh) menunjukkan bahwa skor terbanyak adalah 6 (18,2%), sementara skor tertinggi ialah 30 sebanyak 3,0% dan skor terendah yaitu 21 (6,1%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa implementasi PPK di daerah Kecamatan Wedung memiliki distribusi yang normal. Skor-skor diatas kemudian dilakukan kategorisasi menjadi 4 (empat) kelompok dengan menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi 4 karena variabel ini akan dikategorikan menjadi 4 bagian dengan jarak yang sama. Skor tertinggi adalah 30 dan skor terendah 21 sehingga mempunyai selisih 9. Apabila dibagi 4 kelompok maka intervalnya adalah 2,25. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 53
KATEGORI VARIABEL IMPLEMENTASI PPK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	5	15,2	15,2	15,2
Cukup Baik	18	54,5	54,5	69,7
Baik	5	15,2	15,2	84,8
Sangat Baik	5	15,2	15,2	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Sumber: diolah dari tabel 52

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa 18 responden atau 54,5% mengatakan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung tergolong kategori cukup baik. Sementara 15,2% mengatakan sangat baik, baik dan cukup baik. Sementara 15,2% mengatakan bahwa implementasi PPK di Kecamatan Wedung kurang baik. Hal ini disebabkan karena indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh PPK tidak semuanya dapat terealisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah cukup baik.

b. Kategori Variabel Komunikasi

Tabel 54

TOTAL SKOR VARIABEL KOMUNIKASI

Total Skor	Frekuensi	%
33	2	6,1
34	1	3,0
35	11	33,3
36	4	12,1
37	10	30,3
38	1	3,0
39	1	3,0
40	1	3,0
41	1	3,0
44	1	3,0
Total	33	100,0

Sumber : Perjumlahan q12 s/d 25

Hasil penjumlahan terhadap variabel komunikasi merupakan variabel independen menunjukkan bahwa skor terbanyak adalah 37 (30,3), sementara skor tertinggi adalah 44 (3,0%) dan skor terendah adalah 33 (6,1). Data ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal. Skor-skor diatas kemudian dilakukan kategori menjadi 4 (empat), karena variabel ini akan dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian dengan jarak yang sama. Skor tertinggi adalah 44 dan terendah ialah 33 sehingga mempunyai selisih 11 dan apabila dibagi menjadi 4 kelompok, maka intervalnya adalah 2,75. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 55
KATEGORI VARIABEL KOMUNIKASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	3	9,1	9,1	9,1
Cukup Baik	15	45,5	45,5	54,5
Baik	11	33,3	33,3	87,9
Sangat Baik	4	12,1	12,1	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Sumber : Diolah dari tabel 54

Memperhatikan data di atas 45,5% atau 15 responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa komunikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi PPK di Kecamatan Wedung tergolong kategori cukup baik. Sementara 9,1 % responden berpendapat bahwa komunikasi masih kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi cukup baik dalam mempengaruhi proses implementasi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

c. Kategorisasi Variabel Kemampuan Organisasi

Tabel 56
TOTAL SKOR VARIABEL KEMAMPUAN ORGANISASI

Total Skor	Frekuensi	%
18	2	6,1
19	3	9,1
20	7	21,2
21	12	36,4
22	7	21,2
23	2	6,1
Total	22	100,0

Sumber : penjumlahan q26 s/d 34

Hasil penjumlahan pada variabel kemampuan organisasi menunjukkan skor terbanyak adalah 21 (36,4%), skor tertinggi sebesar 23 (6,1%) dan skor terendah adalah 18 (6,1%). Hal ini juga memberikan

gambaran bahwa kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan PPK di daerah penelitian mempunyai distribusi yang normal. Skor-skor diatas kemudian dilakukan kategorisasi menjadi 4 (empat) kelompok dengan rumus yang sama yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan dibagi 4 (empat) sehingga didapatkan selisih 5, lalu dibagi 4, maka didapatkan 1.25. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 57

KATEGORI VARIABEL KEMAMPUAN ORGANISASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	5	15,2	15,2	15,2
Cukup Baik	7	21,2	21,2	36,4
Baik	12	36,4	36,4	72,7
Sangat Baik	9	27,3	27,3	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari tabel 56

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa 36,4% atau 12 responden menyatakan bahwa organisasi atau tim yang mengelola PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tergolong kategori baik. Sementara 27,3% responden mengatakan sangat baik dan 15,2% berpendapat kurang baik. Hal ini karena PPK tidak menyediakan sarana seperti peralatan komputer, mesin tik yang yang lainnya sehingga menyebabkan seringkali terjadi kelambatan dalam pembuatan laporan. Kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksana atau tim yang mengelola PPK di desa-desa di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tergolong baik, artinya bahwa tim ini mampu mengimplementasikan PPK dengan baik.

d. Kategorisasi Variabel Pengawasan

Tabel 58

TOTAL SKOR VARIABEL PENGAWASAN

Total SKor	Frekuensi	%
22	3	9,1
23	2	6,1
24	5	15,2
25	13	39,4
26	4	12,1
28	1	3,0
30	4	12,1
32	1	3,0
Total	33	100,0

Sumber: penjumlahan q35 s/d 43

Hasil penjumlahan pada variabel terakhir yaitu variabel pengawasan, skor yang terbanyak adalah 25 (39,4%). Sementara skor yang tertinggi adalah 32 (3,0%) dan skor terendah adalah 22 (9,1%). Hal ini memberikan gambaran bahwa pengawasan PPK di Kecamatan Wedung memiliki distribusi yang normal. Skor-skor tersebut di atas kemudian dikategorikan menjadi 4 kelompok dengan menggunakan rumus yang sama yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sehingga didapatkan selisih 10, Angka ini lalu dibagi 4, karena akan dibagi menjadi 4 bagian, sehingga intervalnya 2,5. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 59

KATEGORI VARIABEL PENGAWASAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	5	15,2	15,2	15,2
Cukup Baik	18	54,5	54,5	69,7
Baik	5	15,2	15,2	84,8
Sangat Baik	5	15,2	15,2	100,0
Total	33	100,0	100,0	

Sumber : Diolah dari tabel 58

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa 54,5% atau 18 responden menyatakan bahwa pengawasan cukup berjalan dengan baik,

Khususnya pada pengawasan bangunan fisik. Sementara 15,2% menyatakan kurang baik, khususnya pada kegiatan simpan pinjam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sudah berjalan cukup baik.

C. UJI HIPOTESIS

a. Hubungan Variabel Komunikasi (X1) dengan Implementasi PPK (Y).

Hasil tabulasi silang antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi PPK menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat komunikasi maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi PPK. Hal ini tercermin dimana variabel komunikasi sangat baik, terdapat 50,0% yang menyatakan tingkat implementasi PPK sangat baik pula. Variabel komunikasi sangat baik, terdapat 50,0% juga menyatakan tingkat implementasi baik. Sementara mereka yang menyatakan bahwa komunikasi dianggap kurang baik, terdapat 66,7% yang menyatakan bahwa implementasinya dianggap cukup baik. Hasil tabel silang secara rinci tercermin pada tabel 60.

Tabel 60
HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KOMUNIKASI
DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI PPK

Implementasi PPK	Komunikasi				Total
	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang Baik		2	3		5
		13,3%	27,3%		15,2%
Cukup Baik	2	3	3		8
	66,7%	20,0%	27,3%		24,2%
Baik		6	4	2	12
		40,0%	36,4%	50,0%	36,4%
Sangat Baik	1	4	1	2	8
	33,3%	26,7%	9,1%	50,0	24,2%
Total	3	15	11	4	33
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Hasil analisis hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,329. Hasil ini telah memberikan gambaran ada hubungan yang positif antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi PPK. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 2,188 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95% adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($2,188 > 1,96$). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ($0,329 \times 0,329 \times 100\%$) = 0,11 atau mempunyai pengaruh sebesar 11%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja dapat diterima. Dengan kata lain bahwa ada hubungan yang signifikan

antara variabel komunikasi dengan variabel implementasi PPK. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 61.

Tabel 61

UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koefisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal By Ordinal	Kendall's Tau-b	,329	,155	2,188	95% (tabel=1,96)

b. Hubungan variabel Kemampuan Organisasi (X2) dengan Implementasi PPK

Hasil tabulasi silang antara variabel kemampuan organisasi dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat kemampuan organisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi PPK. Hal ini tercermin dimana variabel kemampuan organisasi sangat baik, terdapat 33,3% yang menyatakan bahwa implementasinya sangat baik juga. Variabel kemampuan organisasi baik, terdapat 41,7% yang menyatakan bahwa implementasi PPK juga baik. Sementara itu kemampuan organisasi kurang baik, maka terdapat 20,0% menyatakan bahwa implementasinya sangat baik, akan tetapi sebaliknya kemampuan organisasi sangat baik, maka 11,1% menyatakan bahwa implementasinya kurang baik. Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan hubungan antara kemampuan organisasi dengan implementasi PPK. Namun demikian hubungan ini tidak terlalu murni karena ada beberapa kasus dimana mereka yang menyatakan bahwa kemampuan organisasi sudah sangat baik

namun ternyata tingkat implementasinya kurang baik. Hasil tabel silang secara rinci dapat dilihat pada tabel 62.

Tabel 62
HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KEMAMPUAN
ORGANISASI DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI PPK

Implementasi PPK	Kemampuan Organisasi				Total
	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang Baik		3	1	1	5
		42,9%	8,3%	11,1%	15,2%
Cukup Baik	2	2	3	1	8
	40,0%	28,6%	25,0%	11,1%	24,2%
Baik	2	1	5	4	12
	40,0%	14,3%	41,7%	44,4%	36,4%
Sangat Baik	1	1	3	3	8
	20,0%	14,3%	25,0%	33,3%	24,2%
Total	5	7	12	9	33
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Hasil analisis hubungan antara variabel kemampuan organisasi dengan implementasi PPK menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,392. Hasil ini telah memberikan gambaran bahwa ada hubungan yang positif antara variabel kemampuan organisasi dengan implementasi PPK. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 2,398 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95% adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($2,398 > 1,96$). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ($0,392^2 = 0,154564$ atau mempunyai pengaruh sebesar 15%). Sehingga

dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja diterima. Dengan demikian bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kemampuan organisasi dengan implementasi PPK. Hasil perhitungan ini dapat terlihat pada tabel 63.

Tabel 63
UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koeffisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal By Ordinal	Kendall's Tau-b	,392	,136	2,398	95% (tabel=1,96)

c. Hubungan variabel Pengawasan (X3) dengan Implementasi PPK (Y)

Hasil tabulasi silang antara variabel pengawasan dengan variabel implementasi PPK menunjukkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat pengawasan, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan implementasi PPK. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel diatas bahwa pengawasan yang sangat baik, maka terdapat 20,0% menyatakan bahwa implementasinya sangat baik pula. Sementara itu ada pula bahwa tingkat pengawasannya sangat baik namun 40,0% menyatakan bahwa implementasinya kurang baik. Hal ini dapat lihat pada tabel 64.

Tabel 64
HUBUNGAN ANTARA VARIABEL PENGAWASAN
DENGAN VARIABEL IMPLEMENTASI PPK

Implementasi PPK	Pengawasan				Total
	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Kurang Baik		2	1	2	5
		11,1%	20,2%	40,0%	15,2%
Cukup Baik	1	6		1	8
	20,0%	33,3%		20,0%	24,2%
Baik	3	6	2	1	12
	60,0%	33,3%	40,0%	20,0%	36,4%
Sangat Baik	1	4	2	1	8
	20,0%	22,2%	40,0%	20,0%	24,2%
Total	5	18	5	5	33
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Hasil analisis hubungan antara variabel pengawasan dengan variabel implementasi menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0,397. Hasil ini telah memberikan gambaran ada hubungan yang positif antara variabel pengawasan dengan variabel implementasi PPK. Guna melihat tingkat signifikansi maka perlu dilihat nilai Z. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Z adalah 2,638 dan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95% adalah 1,96. Hasil ini telah menunjukkan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel ($2,638 > 1,96$). Sedangkan untuk melihat pengaruhnya maka nilai koefisien harus dikuadratkan ($0,397 \times 0,397 \times 100\% = 0,16$ atau mempunyai pengaruh sebesar 16%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis kerja dapat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara variabel pengawasan dengan variabel implementasi PPK. Hasil perhitungan tersebut dapat terlihat pada tabel 65.

Tabel 65

UJI HITUNG RANK KENDALL

		Koeffisien	Standard Error	Nilai Hitung Z	Signifikansi
Ordinal By Ordinal	Kendall's Tau-b	,397	,152	2,638	95% (tabel=1,96)

d. Hubungan variabel Komunikasi, Kemampuan Organisasi dan Pengawasan dengan Implementasi PPK.

Hubungan antara ketiga variabel independen yaitu komunikasi, kemampuan organisasi, dan pengawasan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diuji melalui uji Konkordansi Kendall's. Hasil perhitungan terhadap ketiga independen dengan implementasi PPK menunjukkan koefisien sebesar 0,666. Guna menguji tingkat kebenaran 95% maka nilai Chi-Square tabel adalah sebesar 7,82 Sehingga harga Chi-Square hitung lebih besar jika dibandingkan harga Chi-Square (26,595 > 7,82) atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan dengan implementasi PPK. Sedangkan besar pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap implementasi PPK adalah 0,44 atau mempunyai pengaruh sebesar 44% (merupakan kuadrat dari nilai koefisien W). Sedangkan sisanya adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 66
KOEFSISIEN KONCORDANSI KENDALL

N	33
Kendall's W	,666
Chi-Square	26,595
Df	3
Asymp. Sig	,016

B. Diskusi

Berdasarkan teori-teori tentang implementasi yang telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Grindle, Edward III dan yang lainnya disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program khususnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) antara lain komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, pengolahan dan analisis data terhadap faktor-faktor tersebut, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bahwa komunikasi dengan implementasi PPK mempunyai hubungan yang signifikan pada taraf signifikansi 95%. Sementara besarnya koefisien korelasi antara dua variabel tersebut adalah 0,329. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam pengimplementasian program pembangunan yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dalam hal ini komunikasi dipakai dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, koordinasi pemecahan masalah, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

2. Bahwa kemampuan organisasi dengan implementasi PPK juga mempunyai hubungan yang signifikan pada taraf signifikansi 95%, dengan besar koefisiensi korelasi antara dua variabel adalah 0,392. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan oraganisasi sangat diperlukan dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan. Dengan kemampuan itu program-program tersebut akan berjalan lancar dan terkoordiner dengan baik. Antara para pengelola PPK saling terjadi koordinasi sehingga mengurangi kesalahan persepsi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakharmonisan hubungan antara para pengelola. Pengalaman dalam mengelola program-program lain , selain PPK juga memberikan tambahan pengalaman, sehingga hal ini memudahkan pelaksana dalam melaksanakan program-program selanjutnya tugasnya.
3. Pengawasan dengan implementasi PPK juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan taraf signifikansi yaitu 95%. Sementara besarnya koefisien korelasinya antara dua variabel adalah 0,397. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Khususnya kegiatan proyek pemerintah yang sangat mengharapkan kontrol dari masyarakat. Pengawasan dimungkinkan untuk mengurangi kesalahan yang fatal, sehingga diharapkan adanya perubahan setelah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif sangat penting baik yang dilakukan oleh aparat formal maupun oleh masyarakat secara langsung, sehingga pelaksanaan tugas secara langsung juga akan terkontrol. Mengingat dana untuk kegiatan PPK ini adalah milik bersama,

maka partisipasi masyarakat desa khususnya dalam pelaksanaan dan pelestarian PKK sangat diharapkan

4. Sedangkan secara bersama-sama, antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan juga terdapat hubungan yang signifikan. Sementara besarnya koefisien korelasinya adalah 0,666. Dengan demikian komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan secara bersamaan diperlukan dalam rangka pelaksanaan implementasi PPK di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Disamping faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dengan adanya ketiga faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan implementasi PPK dapat berjalan lancar sesuai tujuan program dan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dan yang berkembang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji Konkordansi Kendall's pada ketiga variabel independen (variabel komunikasi, kemampuan lembaga, dan pengawasan) dengan implementasi PPK menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,666. Dan untuk menguji tingkat kebenarannya, maka dapat dilihat dari nilai Chi-Square yaitu 26,595 dan apabila dikonsultasikan dengan harga tabel untuk tingkat kebenaran 95%, maka nilai Chi-Square tabel adalah 7,82 sehingga harga Chi-Square hitung lebih besar jika dibandingkan harga Chi-Square tabel ($26,595 > 7,82$) atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara variabel komunikasi, kemampuan organisasi dan pengawasan dengan implementasi PPK. Sedangkan besar pengaruh antara ketiga variabel tersebut terhadap implementasi PPK adalah 0,44 atau mempunyai pengaruh sebesar 44% (merupakan kuadrat dari nilai koefisien W). Sementara sisanya adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

2. Hasil uji hipotesis tentang variabel implementasi, menunjukkan bahwa 54,5% dari jumlah responden mengatakan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah cukup baik, hal ini dapat dilihat seberapa besar indikator-indikator dalam program tersebut dapat terealisasi, untuk itu dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:
 - a. Penggunaan dana PPK di desa-desa telah sesuai dengan rencana yang ada. Hal ini dibuktikan dengan 87,87 responden mengatakan bahwa dana PPK telah digunakan sesuai dengan rencana dan pembuatan rencana tersebut sudah melalui proses musyawarah yang cukup panjang antara warga desa. Sehingga pelaksanaannya pun sesuai dengan rencana tersebut.
 - b. Prasarana yang dibangun dan dikembangkan di desa-desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini ditunjukkan pada 31 responden (93,93%) mengatakan bahwa prasarana yang dibangun dan dikembangkan di desa-desa telah sesuai dengan kebutuhan desa, hal ini juga sesuai dengan prinsip PPK. Bahwa PPK mengembangkan model perencanaan *Bottom Up* yaitu menggali aspirasi yang berkembang atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat bawah.
 - c. Prasarana yang dibangun sangat bermanfaat bagi masyarakat desa secara langsung. Hal ini terbukti bahwa 42,42% responden mengatakan demikian. Misalnya bangunan penjernihan air minum di

desa Jungpasir. Sebagian besar masyarakat desa yang memperoleh aliran air ini dapat mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga setiap hari rata-rata Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- d. Masyarakat desa diikutsertakan dalam merencanakan kebutuhan desa. Hal ini terbukti bahwa 75,75% responden menyatakan masyarakat desa selalu diikutsertakan dalam merencanakan kebutuhan desa. Hanya saja keikutsertaannya tersebut melalui perwakilan-perwakilan desa yaitu ketua RW, RT dan tokoh masyarakat.

Sementara 15,2% responden mengatakan bahwa implementasi PPK di Kecamatan Wedung kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini :

- a. Dilihat dari tingkat kecukupan dana PPK baik untuk kegiatan usaha produktif misalnya untuk kegiatan simpan pinjam maupun untuk pembangunan dan peningkatan prasarana serta sarana penunjang perekonomian desa, maka dana tersebut dirasakan masih sangat kecil. Hal ini terbukti dengan pendapat responden yaitu 100% mengatakan seperti itu. Dana yang diusulkan tidak semuanya dipenuhi pihak PPK dengan pertimbangan keterbatasan dana program, sehingga ketepatan perencanaan menjadi bahan pertimbangan.
- b. Keikutsertaan masyarakat terhadap pelestarian PPK dirasakan masih kurang. Hal ini terbukti bahwa 51,51% responden mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk pelestarian program masih kurang. Misalnya masih banyaknya tunggakan angsuran simpan

pinjam dan sebagian bangunan tidak terpelihara, seperti bangunan saluran air di desa Mutih Wetan, betonisasi di desa Kenduren yang pecah-pecah. Keinginan warga biya untuk pemeliharaan bangunan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa, sementara Pemerintah Desa tidak memiliki dana.

- c. PPK kurang mampu meningkatkan ekonomi desa. Hal ini didukung data yaitu 57,57% menyatakan bahwa PPK kurang mampu meningkatkan ekonomi desa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana khususnya untuk kegiatan simpan pinjam. Disamping itu juga karena tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah, terbukti masih banyaknya tunggakan angsuran.
 - d. PPK tidak mampu membuka lapangan kerja baru di desa-desa. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan dana untuk kegiatan simpan pinjam maupun penyediaan prasarana dan sarana. Hal ini terbukti pendapat responden sebesar 90,90% mengatakan hal itu.
 - e. PPK masih kurang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara langsung. PPK hanya mampu meningkatkan pendapatan sebagian kecil masyarakat desa, yaitu masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari PPK, misalnya kegiatan simpan pinjam.
3. Hasil perhitungan tentang variabel komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada implementasi PPK telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari 45,5%

responden mengatakan hal ini. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi PPK telah dilaksanakan cukup baik oleh Fasilitator Desa, hal ini terbukti 93,93% mengatakan seperti itu. Sementara itu kejelasan informasi sosialisasi kepada warga desa dirasakan cukup jelas dan mudah dimengerti. Hal ini ditunjukkan bahwa 96,96% responden mengatakan hal itu. Sosialisasi PPK melalui papan pengumuman juga dipandang cukup efektif, terbukti 66,66% responden mengatakan demikian. Hanya saja tidak semua RW memiliki papan pengumuman. Dan yang paling efektif dalam sosialisasi PPK adalah dengan menggunakan perkumpulan pengajian. Hal ini terbukti 100,0% responden mengatakan hal itu. Karena sebagian besar warga desa adalah Islam, sehingga perkumpulan pengajian tersebut dipandang lebih efektif untuk menyampaikan sosialisasi program. Surat sebagai media menyampaikan saran dan masukan dipandang cukup baik, hal ini terbukti bahwa 69,69% mengatakan demikian. Sementara itu koordinasi juga cukup sering dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPK, terbukti 75,75% mengatakan hal itu. Koordinasi juga dimanfaatkan untuk pemecahan internal desa, hal ini terbukti bahwa 87,87% mengatakan seperti itu.

Disamping itu 9,1% responden mengatakan bahwa komunikasi kurang berjalan dengan baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi PPK melalui selebaran dirasakan kurang efektif, hal ini terbukti 90,90% responden mengatakan hal itu. Karena model ini tidak efisien dan pemborosan dari sisi tenaga dan waktu. Sosialisasi di rumah Kepala Desa/Kantor Kepala Desa juga dirasakan kurang efektif. Hal ini terbukti bahwa 72,72% responden kurang sependapat. Alasan yang muncul adalah warga desa kurang atau belum terbiasa untuk datang ke kantor Kepala desa atau ke rumah Kepala Desa dan kebanyakan mempunyai perasaan sungkan. Koordinasi pelaksanaan tugas diantar desa penerima dana PPK jarang dilakukan. Hal ini terbukti bahwa 54,54% mengatakan hal itu. Sementara koordinasi untuk pemecahan masalah antar desa juga jarang dilakukan, hal ini terbukti 54,54% mengatakan hal itu. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa masalah desa adalah masalah internal desa, oleh karena jika ada masalah harus diselesaikan sendiri oleh desa yang bersangkutan, mengadakan koordinasi ke luar desa dianggap kurang sesuai, karena masalah desa adalah aib desa sehingga tidak perlu disebar luaskan ke desa lain.
4. Uji perhitungan tentang variabel kemampuan organisasi atau tim menunjukkan bahwa organisasi atau tim pengelola PPK sudah melaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti 36,4% responden mengatakan hal itu. Namun lebih perinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Jumlah tenaga pengelola PPK dirasakan sudah cukup. Terbukti 93,93% mengatakan demikian. Pendelegasian wewenang dari tingkat

kecamatan kepada desa juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti 78,78% responden berpendapat seperti itu. Misalnya saja Juklak dan Juknis PPK, secara langsung dikirim ke desa-desa. Dalam pelaksanaan PPK juga telah mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Terbukti 78,78% responden mengatakan hal itu. Pelaksanaan PPK di desa-desa juga disarakan mudah, Terbukti 75,75% mengatakan demikian. Hal ini disebabkan karena desa-desa tersebut pernah mendapatkan bantuan program pembangunan seperti PDMDKE dan yang lainnya.

Sementara itu 15,2% responden mengatakan bahwa organisasi atau tim PPK kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini disebabkan karena :

- a. Insentif pengelola yang sangat kecil, sehingga menyebabkan menurunnya semangat kerja para pengelola PPK di desa-desa.
- b. Tidak tersedianya fasilitas seperti peralatan mesin tik, komputer, hal ini menyebabkan juga kinerja para pengelola juga menurun sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan PPK.
- c. Pelatihan dan keterampilan sebelum melaksanakan PPK masih kurang. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah persepsi dalam memahami aturan, sehingga yang terjadi adalah kesalahan bahkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

- d. Antisipasi timbulnya masalah masih kurang dilakukan dan setiap ada masalah cara mengatasinya masih juga kurang cepat, harus menunggu dari pihak kecamatan.
5. Uji perhitungan tentang variabel pengawasan menunjukkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan PPK di desa-desa sudah cukup baik. Hal ini terbukti 54,5% responden menyatakan hal itu. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Aturan-aturan yang ada seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sudah cukup tersedia.
 - b. Aturan-aturan tersebut juga cukup mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengelola PPK, hal ini disebabkan karena pendidikan para pengelola cukup baik.
 - c. Penentuan standar juga telah sesuai dengan kondisi riil masyarakat desa.
 - d. Pelaksanaan kegiatan PPK juga telah sesuai dengan rencana.
 - e. Hasil kegiatan PPK telah sesuai dengan standar kerja yang ada.
 - f. Setiap ada penyimpangan selalu dilakukan tegoran secara lisan maupun tertulis.

Namun demikian pelaksanaan pengawasan juga dikatakan kurang baik, yaitu 15,2% responden yang mengatakan demikian. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan PPK masih kurang baik.

Baik itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak aparat yaitu dari

Kabupaten, Kecamatan dan desa maupun pengawasan secara langsung dari masyarakat.

- b. Sekalipun tegoran secara tertulis dilaksanakan, namun sanksi tidak pernah diterapkan kepada yang melakukan penyimpangan, karena pertimbangan kemanusiaan.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya kesepakatan bersama antar warga desa dalam rangka menyusun kembali besarnya pinjaman untuk usaha produktif, karena dana pinjaman untuk kegiatan ini sangat kecil yaitu antara Rp. 100.000, s/d Rp. 1.000.000,-. Sehingga hasil usahanya kurang nampak.
2. Perlu mengoptimalkan sosialisasi dan koordinasi PPK dalam hal: (1) partisipasi pelestarian pada usaha simpan pinjam dan pemeliharaan bangunan, (2) pemecahan masalah PPK.
3. Perlu peningkatan kemampuan organisasi dalam hal (1) peningkatan insentif bagi para pengelola PPK di desa-desa, (2) pengadaan sarana penunjang administrasi proyek, (3) peningkatan pelatihan dan keterampilan, tidak hanya pada para pengelola tetapi juga tokoh masyarakat.
4. Perlu peningkatan antisipasi terhadap masalah, pengawasan preventif dan menerapkan sanksi pelanggaran bagi yang menyimpang sebagai bentuk kesadaran hukum bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA (BUKU)

- Abdullah, M. Syukur, 1988, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- Bardach, Eugene, 1979, *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*, The MIT Press, Massachusetts and London, Cambridge
- Dunn, William. N., 1992, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Eaton, Josep. W., 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional*, Terjemahan: Pandam Guritno dan Aldi Jeni, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Edwards III, George C., 1986, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 2001, *Organization, 8 Ed*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Grindle, Meriless S (Ed), 1980, *Politics and Policy Implementation in the third Word*, Princeton University Press, New Jersey
- Gie, the Liang, 1979, *Unsur-unsur Administrasi*, Suatu Kumpulan Karangan, Karya Kencana, Yogyakarta
- Hesselbein, Gold smith, Bechard, 1997, *The Organization of the Future*, Gramedia, Jakarta

- Handoko, T.Hani, 1986, *Manajemen*, YPFE UGM, Yogyakarta
- Indrawijaya, Adam I, 1989, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung
- Islamy, Irfan, 1986, *Analisis Implementasi Kebijakan*, Bima Aksara, Jakarta
- Jones, Charles O, 1981, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
- , 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* terjemahan Nashir Budiman (Ed), Rajawali Press, Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cetakan Pertama, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjoroningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Manullang, M, 1982, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yudhistira, Jakarta.
- Muhammad, Arni, 2001, *Komunikasi Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Mustopadjaja dan Tjokroamidjojo, Bintoro, 1985, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Nazir, 1983, *Metodologi Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Pressman, Jeffrey L. & Aaron Wildavsky, *Implementation*, University of California press, Bekerly, Los Angeles, London
- Triatmodjo, Sudiby, 2000, *Sistem Pengawasan*, Lembaga Administrasi Negara
- Ramli, Rusli, 1984, *Asas-Asas Manajemen*, Modul UT, Karunia, Jakarta.
- Salusu, 2000, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Cetakan Ketiga, Grasindo, Jakarta.

- Siagian, Sondang P, 1996, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 1988, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Silalahi, Albert, 1999, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Swastha, Basu, 1984, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Liberty
- Soenarko SD, 2000, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1988, *Pengawasan Melekat sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta.
- _____, 1989, *Perencanaan Pembangunan*, Masagung, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Prenhallindo, Jakarta
- Quade.E.S, 1984, *Analisis for Public Deciston*, Elservies Science Publizing, New York
- Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijakan*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 1992, *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Winardi, 1986, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung

DAFTAR PUSTAKA (NON BUKU)

- Bappenas, 1997, *Media Informasi, Profesi, dan Komunikasi Perencanaan Pembangunan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Billem, Martin, 2002, *Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Propinsi Jawa Tengah*, Konsultan Manajemen PPK, Semarang
- Kerjasama Bappeda Kabupaten Denak dengan BPS Kabupaten Demak, 1999, *Kebupaten Demak Dalam Angka*, Demak.
- Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Tengah dengan BPS Propinsi Jawa Tengah, 2000, *Jawa tengah Dalam Angka*, Asta Gatra Lesara, Semarang
- Petunjuk Pelaksanaan, 2001, *Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*, Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jakarta.
- Petunjuk Teknis, 2001, *Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*, Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jakarta.
- Selayang Pandang, 2002, *Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*, Sekretariat, Kabupaten Demak